

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Pengeluaran

2012 - 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ACEH BARAT**

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Barat Menurut Pengeluaran

2012-2016



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN ACEH BARAT MENURUT PENGELUARAN 2012-2016**

Nomor Publikasi : 11070.1704
Nomor Katalog : 9302003.1107
Nomor ISSN : 2541-4909

Ukuran Buku : 29,7 x 21 cm
Jumlah Halaman : v + 66 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Gambar Sampul:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2016 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya, publikasi ini menyajikan tinjauan tentang perkembangan ekonomi makro Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2016). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh PBB.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Meulaboh, September 2017
Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat,


Mughlisuddin, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar	3
1.3 Manfaat dan Implikasi Perubahan Tahun Dasar 2010	4
1.4 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010	5
1.5 Kegunaan	6
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	8
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	11
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	15
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor Impor	22
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN	24
3.1 Nilai PDRB	25
3.2 Struktur Ekonomi	25
3.3. Pertumbuhan Ekonomi	28
3.4. Laju Implisit	30
3.5. PDRB Perkapita	32
IV. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB MENURUT PENGELUARAN	34
4.1. Konsumsi Rumah Tangga	35
4.2. Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	40
4.3. Konsumsi Pemerintah	42
4.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45
4.5. Perubahan Inventori	50
4.6 Ekspor	51
4.7 Impor	54
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 PDRB Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	25
3.2 Peranan Komponen Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 (Persen)	26
3.3 Nilai PDRB (Trilyun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Aceh Barat Tahun 2012-2016	28
3.4 Pertumbuhan Ekonomi Tiap komponen di Aceh Barat Tahun 2016 (Persen)	30
3.5 Laju Implisit Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	31
3.6 PDRB Per Kapita Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	32
3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2012-2016 (Persen)	33
4.1 Nilai Komponen LNPRT Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Milyar Rupiah)	41
4.2 Peranan dan Pertumbuhan Komponen LNPRT Aceh Barat, 2012-2016 (Persen)	42
4.3 Nilai Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	43
4.4 Peranan dan Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	44
4.5 Nilai Komponen PMTB Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	46
4.6 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	47
4.7 Nilai PMTB Bangunan Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	48
4.8 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Bangunan Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	48
4.9 Nilai PMTB Non Bangunan Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	49
4.10 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Non Bangunan Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	50
4.11 Nilai Komponen Perubahan Inventori (Milyar Rupiah) dan Peranannya (Persen) dalam PDRB Aceh Barat, 2012-2016	51
4.12 Nilai Ekspor Kabupaten Aceh barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	52
4.13 Peranan dan Pertumbuhan Ekspor Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	53
4.14 Nilai Impor Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)	54
4.15 Peranan dan Pertumbuhan Impor Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	55

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	5
1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	6
3.1	Peranan Komponen Ekonomi Tahun 2012-2016 (Persen)	27
3.2	Laju Pertumbuhan Komponen Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)	29
4.1	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Juta Rupiah)	36
4.2	Distribusi Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen)	36
4.3	Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK (Persen)	37
4.4	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK (Juta Rupiah)	38
4.5	Laju Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (Persen)	39
4.6	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Aceh Barat ADHB (Juta Rupiah)	40

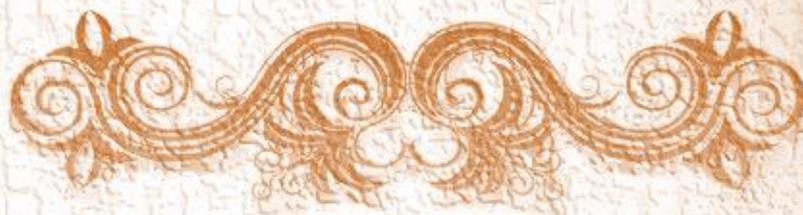
LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	57
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	58
3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)	59
4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)	60
5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)	61
6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)	62
7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (2010=100)	63
8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2010=100)	64
9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010=100)	65
10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (Persen)	66



I. Pendahuluan

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi. Angka Pendapatan Regional atau PDRB merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan dari pada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas.

1.2 PENGERTIAN PDRB, AGREGAT PDRB DAN TAHUN DASAR

PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara Internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Nilai PDRB adalah nilai tambah dari total produksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan volume. Karenanya ada dua jenis nilai PDRB disajikan yakni berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pergeseran tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan dalam lingkup nasional, BPS Kabupaten Aceh Barat juga melakukan pergeseran tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Keseragaman tahun dasar PDRB dan PDB memungkinkan pengguna data dapat melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, demikian juga perbandingan antar daerah

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

1.3 MANFAAT DAN IMPLIKASI PERUBAHAN TAHUN DASAR 2010

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional. Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:
- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;

- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index /PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

1.4 PERUBAHAN KLASIFIKASI DARI PDRB TAHUN DASAR 2000 KE PDRB TAHUN DASAR 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Konstruksi	E. Pengadaan Air
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	F. Konstruksi
7. Pengangkutan dan Komunikasi	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	H. Transportasi dan Pergudangan
9. Jasa-jasa	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

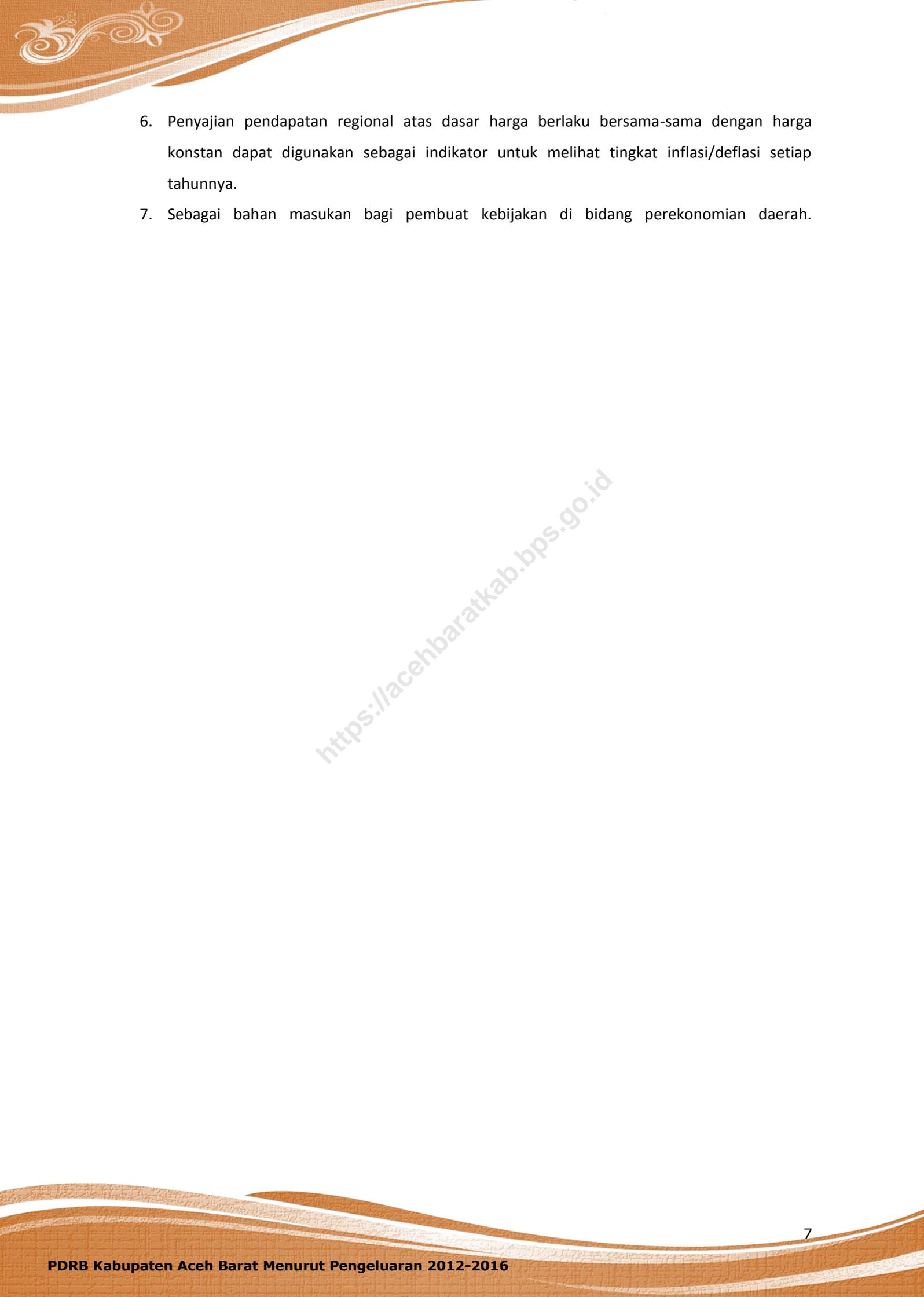
Tabel 1.2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

1.5 KEGUNAAN

Kegunaan dari penyusunan publikasi PDRB Kabupaten Aceh Barat menurut pengeluaran 2012-2016 adalah:

1. Untuk menyatakan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan dalam daerah maupun yang berasal dari daerah lain termasuk impor dari luar negeri, untuk memenuhi permintaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
 - c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - d. Pembentukan modal tetap bruto
 - e. Perubahan inventori
 - f. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor.
2. Mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi makro berbagai pelaku ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik).
3. Mengetahui informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain.
4. Penyajian angka pendapatan regional atas dasar harga konstan akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun sektoral.
5. Nilai pendapatan atau PDRB per kapita secara makro dapat digunakan dalam melakukan analisis perbandingan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain, serta peningkatannya setiap tahun.

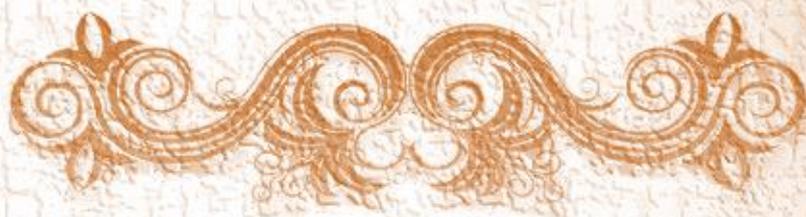
- 
6. Penyajian pendapatan regional atas dasar harga berlaku bersama-sama dengan harga konstan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi/deflasi setiap tahunnya.
 7. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang perekonomian daerah.

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



II. Metode Estimasi dan Sumber Data

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok

2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri
- b. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- c. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
- d. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
- e. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun

- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*).

Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak

berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga.
- c. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.
- e. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT.

Nilai output non-pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi LNPRT adalah:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *updating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Estimasi PK-LNPRT dengan menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- a. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi.
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Dirjen Perbendaharaan Aceh)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Keuangan Kabupaten/Kota)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adalah Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut ditambah pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi

finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari :

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov./Kab./Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level Provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*),

yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-"*deflate*" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original, data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original, data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga

kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian.
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan.
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.

- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB)
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sbb:

- a. menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya.

- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai.
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, mendorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$).
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$).
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI.
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang.
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.

g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

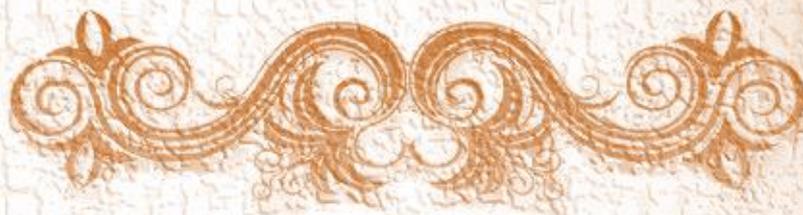
Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



III. Tinjauan Perekonomian Berdasarkan PDRB Menurut Pengeluaran

<https://acehbaratkab.bps.go.id>

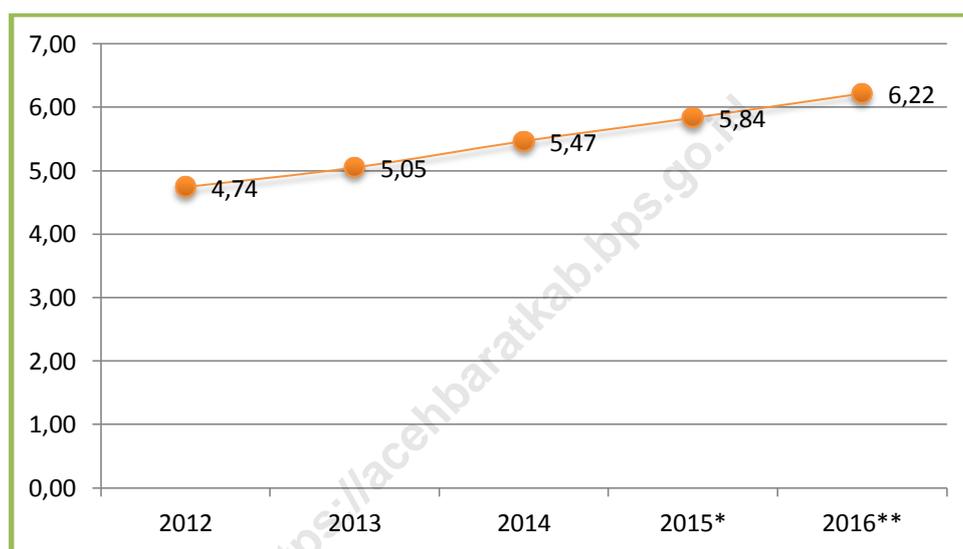


III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN

3.1 NILAI PDRB

PDRB Aceh Barat menurut Pengeluaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 4,74 trilyun rupiah pada tahun 2012 menjadi 5,05 trilyun rupiah pada tahun 2013. Bahkan pada tahun 2016 PDRB Aceh Barat telah mencapai angka 6,22 trilyun rupiah.

Gambar 3.1 PDRB Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Diantara 23 kabupaten/kota dalam provinsi Aceh, PDRB Aceh Barat menempati posisi kesembilan tertinggi. Ini merupakan hal yang membanggakan, akan tetapi Pemerintah Daerah beserta jajarannya harus terus berupaya meningkatkan angka PDRB ini. Terlebih lagi pembangunan daerah sekitarnya terutama Kabupaten Nagan Raya akan terus melesat.

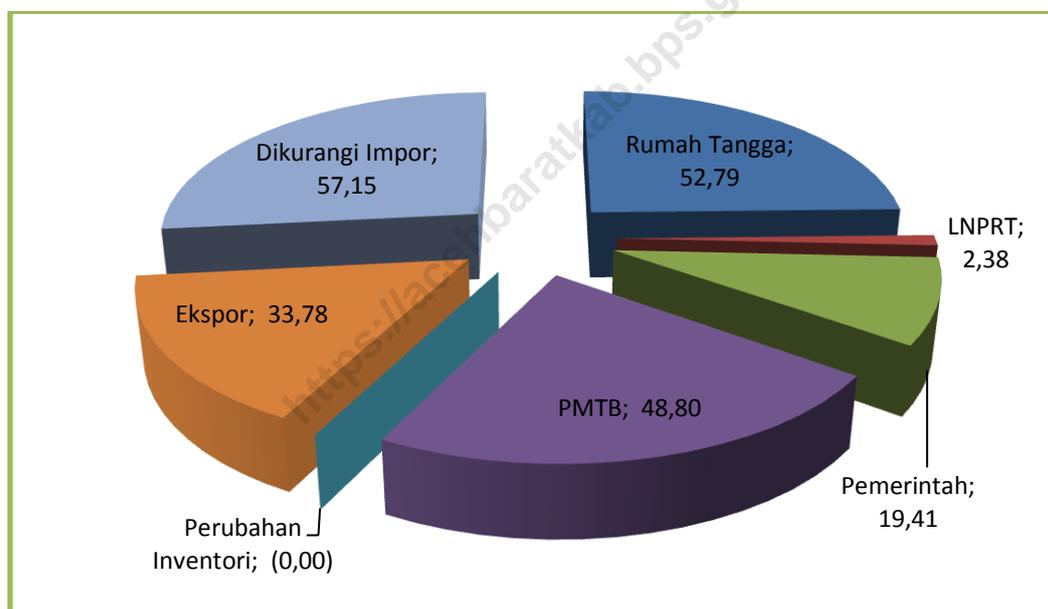
3.2 STRUKTUR EKONOMI

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing komponen ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Periode tahun 2012 hingga tahun 2016, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat relatif tidak mengalami perubahan. Terdapat tiga komponen utama yang

menopang perekonomian Kabupaten Aceh Barat yaitu komponen konsumsi rumah tangga, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen ekspor.

Komponen-komponen ini sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Barat menurut pengeluaran. Pada tahun 2016 komponen konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 52,79 persen terhadap total PDRB. Kemudian diikuti oleh komponen PMTB sebesar 48,80 persen pada posisi kedua, dan komponen ekspor pada posisi ketiga dengan nilai sebesar sebesar 33,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Aceh Barat sebagian besar dibelanjakan untuk ketiga komponen pengeluaran diatas. Sayangnya komponen impor sebagai komponen penyeimbang juga sangat besar nilainya (57,15 persen). Hal ini dikarenakan sebagian besar bahan konsumsi rumah tangga (terutama non makanan) dan bahan-bahan konstruksi dipasok dari luar daerah.

Gambar 3.2 Peranan Komponen Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 (Persen)



*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Jika dilihat periode 2012-2016 komponen konsumsi rumah tangga mengalami kontribusi yang semakin besar setiap tahunnya. Pada tahun 2012 komponen ini memberikan kontribusi sebesar 50,90 persen terhadap PDRB Aceh Barat. Selanjutnya pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh konsumsi rumah tangga ini meningkat mencapai 51,44 persen. Peningkatan kontribusi komponen ini terus terjadi setiap tahun sehingga mencapai angka 52,79 persen di tahun 2016.

Besarnya konsumsi penduduk seyogyanya dapat ditekan, salah satunya dengan mengontrol laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian jumlah kelahiran. Selain itu gaya hidup

masyarakat Aceh Barat yang terkenal konsumtif juga harus berusaha dirubah. Bila konsumsi masyarakat terus melonjak tanpa dibarengi lonjakan pendapatan/penghasilan, niscaya masyarakat tidak akan mampu menyisihkan pendapatannya untuk komponen PMTB dan perubahan inventori. Padahal kedua komponen ini justru lebih menguntungkan daerah sebagai modal pembangunan.

Tabel 3.1 Peranan Komponen Ekonomi Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,90	51,44	52,18	52,42	52,79
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,12	2,16	2,43	2,28	2,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,62	17,89	18,44	20,35	19,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	53,04	49,05	48,77	48,01	48,80
5. Perubahan Inventori	1,39	0,10	(0,00)	(0,00)	(0,00)
6. Ekspor	40,86	41,90	39,66	37,87	33,78
7. Dikurangi Impor	63,93	62,55	61,48	60,93	57,15
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Komponen yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB menurut pengeluaran adalah komponen PMTB. Jika dilihat periode tahun 2012 sampai 2016, peranan komponen ini juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, kontribusi PMTB ini mencapai nilai 53,04 persen. Seperti kita ketahui kegiatan eksplorasi tambang masih cukup tinggi dan investasi tanaman perkebunan mulai mengemuka sehingga kontribusi PMTB non bangunan memberikan andil yang besar.

Selanjutnya Komponen ini kembali mampu menyerap dana total PDRB sebesar sekitar 48 hingga 49 persen selama tahun 2013 hingga 2016 dengan selesainya masa eksplorasi dan evaluasi tambang untuk selanjutnya memasuki tahap produksi.

Komponen yang terbesar selanjutnya dalam pembentukan PDRB pengeluaran Aceh Barat adalah ekspor. Pada tahun 2012 kontribusi komponen ini sebesar 40,86 persen. Barang yang diekspor terutama berbentuk bahan mentah seperti bahan perkebunan. Sejak tahun 2013 Aceh Barat mulai intens mengeksport bahan tambang batubara dengan kontribusi komponen ekspor di tahun tersebut mencapai 41,90 persen. Sepanjang tahun 2014-2016 kontribusi komponen ini terus

berkurang. Mulai menurunnya harga hasil perkebunan dan batubara membuat kontribusi komponen ini selama tiga tahun terakhir mulai melemah.

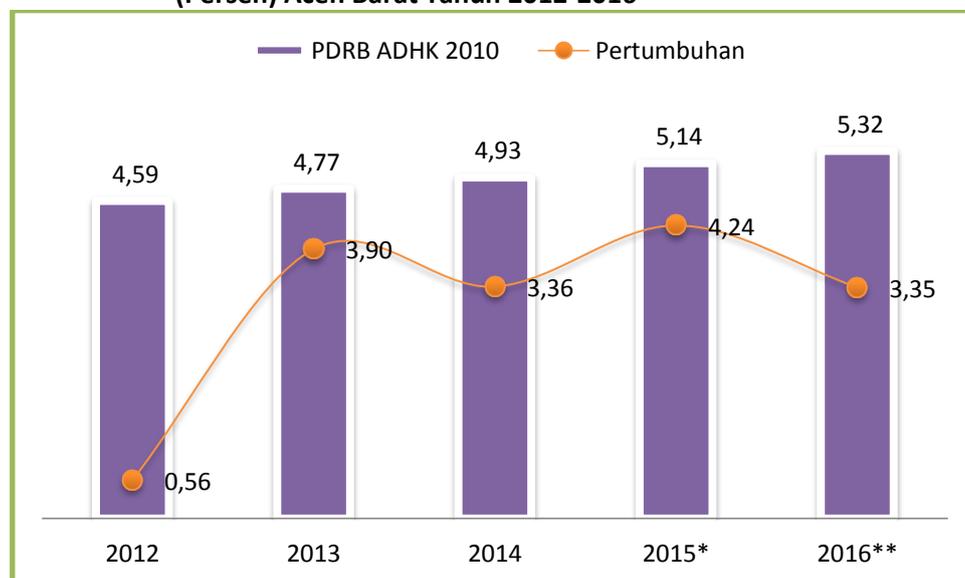
Komponen konsumsi pemerintah merupakan alokasi belanja terbesar keempat dalam PDRB menurut pengeluaran. Peranan komponen ini dalam tahun 2012 mencapai 15,62 persen dan semakin meningkat menjadi 19,41 persen di tahun 2016 dengan semakin besarnya kucuran dana baik dari APBK, APBA maupun APBN. Hal ini patut disayangkan mengingat seperti halnya belanja rumah tangga, belanja pemerintah yang sebagian besar ditujukan untuk belanja pegawai ini harusnya dapat lebih ditekan, sehingga memberi banyak ruang gerak kepada komponen investasi untuk berkembang melalui peningkatan belanja modal.

Komponen penyeimbang yang juga patut dicermati adalah impor. Sepanjang lima tahun terakhir sebesar 57-64 persen total PDRB ternyata berasal dari luar daerah. Sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga, bahan konstruksi, dan aset non bangunan. Komponen ekonomi lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.3 PERTUMBUHAN EKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut.

Gambar 3.3 Nilai PDRB (Trilyun Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Aceh Barat Tahun 2012-2016



*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, selama kurun waktu 2012–2016 nilai PDRB konstan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat semakin meningkat. Pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi Aceh Barat mencapai 0,56 dan 3,90 persen dengan PDRB konstan yang terbentuk mencapai 4,59 dan 4,77 triliun rupiah. Nilai ini tumbuh lagi sebesar 3,36 persen tahun 2014 dan 4,24 persen pada tahun 2015 sehingga PDRB Aceh Barat mencapai angka 4,93 dan 5,14 triliun rupiah. Pada tahun 2016 PDRB konstan wilayah ini menyentuh angka 5,32 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 3,35 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 disebabkan perlambatan pertumbuhan komponen PMTB. Seperti kita ketahui bahwa triwulan terakhir ditahun tersebut pertambangan batubara telah mulai berproduksi. Sehingga aset tetap di sektor pertambangan berupa investasi telah berkurang. Pada tahun-tahun selanjutnya perekonomian Aceh Barat stabil di angka tiga persen. Bahkan selama tahun 2015 pertumbuhan ekonomi yang dicapai menembus angka 4 persen yang ditopang oleh pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah. Namun sayangnya, di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mulai sedikit melambat di angka 3 persen, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya ekspor batu bara ke luar wilayah Aceh Barat akibat anjloknya harga batu bara dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika.

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Komponen Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2016 (Persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,11	3,08	3,73	4,04	3,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,75	6,82	15,61	(4,35)	7,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,46	2,47	5,29	7,18	0,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,60	(2,57)	4,04	3,83	4,07
6. Ekspor	5,88	11,90	0,04	0,05	(5,18)
7. Dikurangi Impor	10,01	0,59	2,49	0,92	(3,06)
P D R B	0,56	3,90	3,36	4,24	3,35

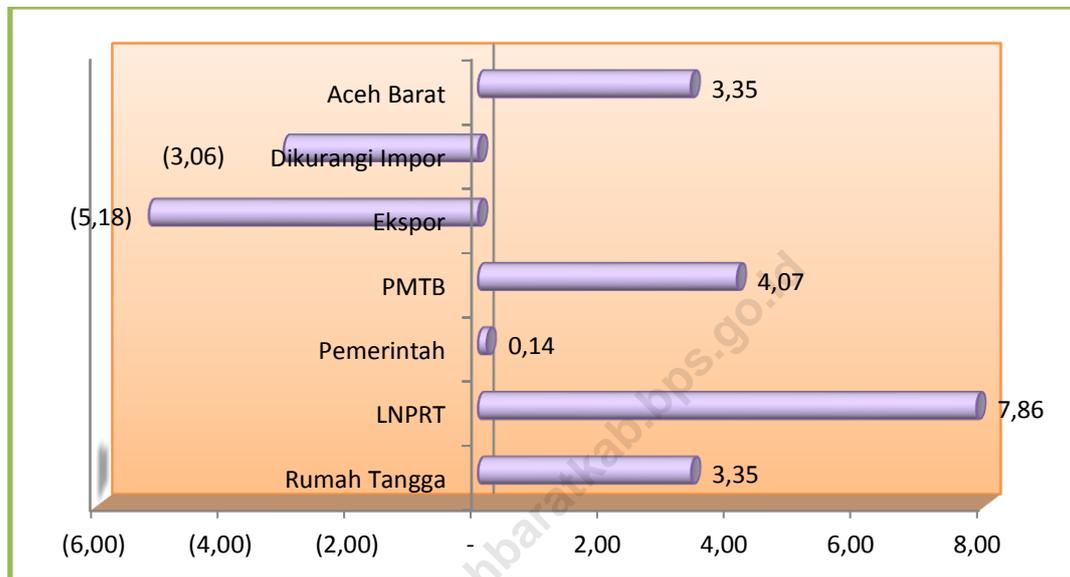
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang 2016 adalah komponen komponen konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang mencapai angka 7,86 persen dengan semakin besarnya dana yang dikeluarkan untuk kampanye partai politik dalam pemilihan Bupati Aceh Barat. Sedangkan Komponen Ekspor mengalami kontraksi sebesar 5,18 persen. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 harga batu bara dunia turun drastis dan nilai rupiah

melemah terhadap dollar amerika sehingga produksi batu bara yang di ekspor pun menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi komponen lainnya ada yang tumbuh diatas maupun dibawah angka pertumbuhan ekonomi kabupaten yang sebesar 3,35 persen. Untuk lebih rinci dapat dilihat di gambar 3.4.

Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Tiap Komponen di Aceh Barat Tahun 2016 (Persen)



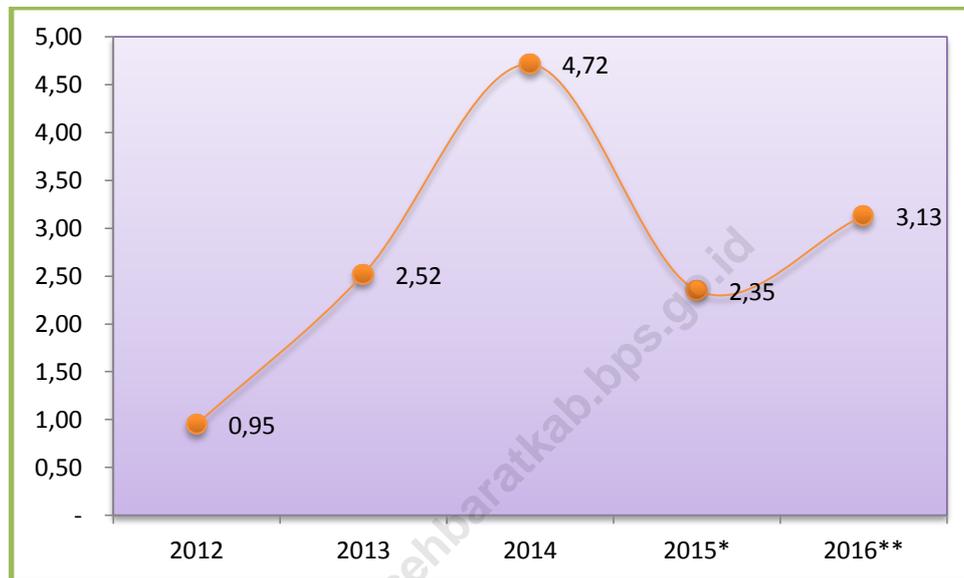
3.4. LAJU IMPLISIT

Perbedaan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan diatas disebabkan adanya kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya. Laju kenaikan harga barang tersebut tercermin dari laju indeks implisit yang biasa dikenal dengan laju implisit. Laju implisit ini mengukur kenaikan harga ditingkat produsen. Sedangkan kenaikan harga yang biasa dialami langsung oleh masyarakat diukur dari Laju indeks harga konsumen yang biasa disebut Laju Inflasi. Laju inflasi dan Laju Implisit ini akan saling mempengaruhi, searah dan tidak akan terlalu jauh berbeda nilainya.

Bila laju implisit/laju inflasi ini bernilai positif berarti terjadi kenaikan harga barang/jasa (inflasi). Sebaliknya bila laju implisit/laju inflasi ini bernilai negatif maka mengindikasikan adanya penurunan harga barang/jasa (deflasi). Angka inflasi sendiri dikumpulkan setiap bulannya, laju inflasi kalenderlah yang dapat disandingkan dengan laju implisit.

Selama ini terdapat dua kota pencatat inflasi di Provinsi Aceh yang dapat dijadikan rujukan inflasi di kabupaten/kota lain, yaitu Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Sejak tahun 2014 Kabupaten Aceh Barat telah menjadi Kabupaten ketiga pencatat inflasi di provinsi ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, angka inflasi di kedua kota inilah yang dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap laju implisit daerah Aceh di pesisir pantai barat selatan. Kini masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya telah dapat menjadikan inflasi Kota meulaboh sebagai rujukan.

Gambar 3.5 Laju Implisit Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012 laju implisit Kabupaten Aceh Barat mencapai angka 0,95 persen. Mendekati laju inflasi kota Banda Aceh (0,06 persen) dan Kota Lhokseumawe (0,39 persen). Selanjutnya di tahun 2013, kenaikan harga barang dan jasa dalam kabupaten ini melesat cepat yaitu sebesar 2,52 persen. Sebagai catatan, laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe sebesar 6,39 dan 8,27 persen.

Meroketnya harga komoditi cabe merah pada minggu keempat Desember tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2013 membuat inflasi ditahun ini melonjak tinggi. Hal ini diperparah lagi dengan menurunnya nilai tukar rupiah sehingga pada tahun 2013 inflasi Kota Banda Aceh mencapai 6,39 persen dan Kota Lhokseumawe sebesar 8,27 persen. Laju implisit Aceh Barat sebagai acuan kenaikan harga jual ditingkat produsen pada tahun 2013 juga mencapai angka 2,52 persen.

Selama tahun 2014 laju implisit Aceh Barat menembus angka 4,72 persen. Hal ini dapat dimaklumi dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Bahkan laju inflasi tahunan daerah ini pada tahun yang sama bernilai 8,20 persen.

Selama tahun 2015 kenaikan harga produsen di Aceh Barat hanya sebesar 2,35 persen. Hal ini menandakan bahwa kenaikan harga produsen disini telah stabil. Sementara itu, selama tahun 2016 laju implisit Aceh Barat mencapai 3,13 persen. Kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap pada tahun tersebut menyebabkan laju inflasi di wilayah ini menembus sekitar 3,77 persen. Kedepannya diharapkan kenaikan harga yang terjadi akan dapat dikendalikan demi kepentingan masyarakat ekonomi bawah khususnya.

3.5 PDRB PERKAPITA

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Secara makro PDRB per kapita dapat dijadikan ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah.

Gambar 3.6 PDRB Per Kapita Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)



*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita dapat dilihat atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Selama tahun 2012-2016 PDRB perkapita masyarakat Aceh Barat bernilai 26-31 juta rupiah. Dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi (3-6 persen). Bahkan sempat menurun di tahun 2012 (negatif 1,17 persen).

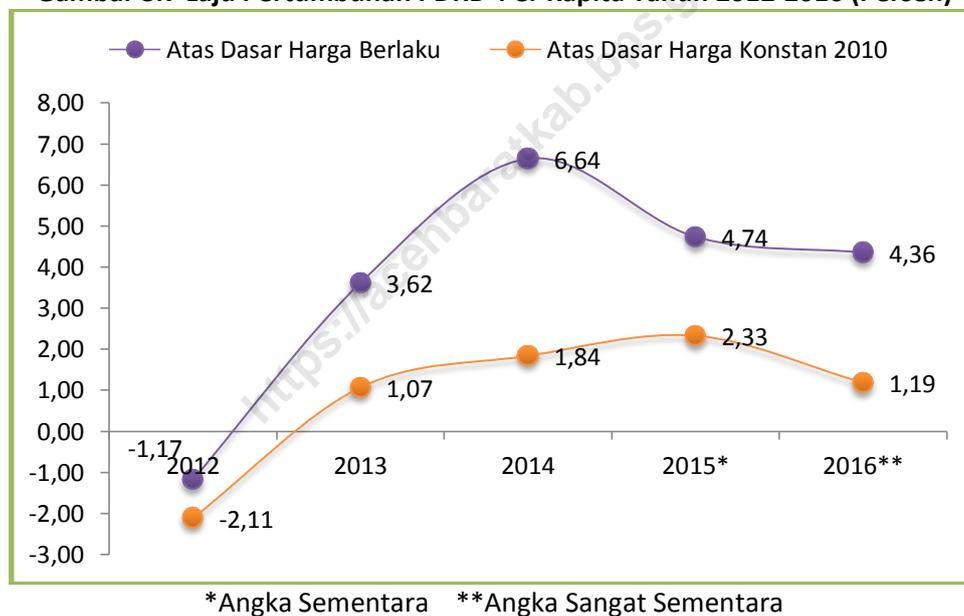
Angka PDRB per kapita ini menggambarkan rata-rata output penduduk per jiwa selama setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu dan dua orang anak), diperkirakan pendapatan rumah tangga sebesar 104-126 juta rupiah pertahun atau 8,7-10,5 juta rupiah per bulan.

Padahal kenyataannya masih terdapat rumah tangga di daerah ini yang mempunyai pendapatan dibawah itu.

Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan per kapita dapat dilihat dari PDRB harga konstan. Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Aceh Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir berkisar antara 25,19 juta rupiah (tahun 2012) sampai 26,86 juta rupiah (tahun 2016). Hal ini menggambarkan secara riil ternyata pendapatan penduduk setiap tahunnya hanya mengalami sedikit peningkatan.

Dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita secara harga berlaku, tetapi kenaikan harga pada tahun tersebut juga tinggi, maka kenaikan pendapatan per kapita tidak akan terlalu membantu terhadap perbaikan ekonomi masyarakat.

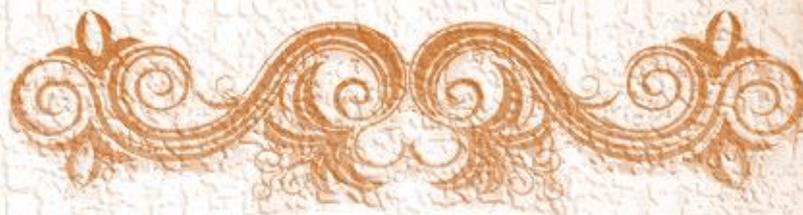
Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016 (Persen)





IV. Perkembangan Komponen PDRB Menurut Pengeluaran

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



IV. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB MENURUT PENGELUARAN

4.1. KONSUMSI RUMAH TANGGA

4.1.1 Nilai dan Distribusi Persentase ADHB

Perkembangan nilai konsumsi rumah tangga di Aceh Barat selama lima tahun terakhir amat pesat. Pada tahun 2012, total konsumsi rumah tangga di Aceh Barat mencapai 2,41 trilyun rupiah. Artinya, sejak tanggal 1 Januari 2012 hingga 31 Desember pada tahun yang sama, seluruh rumah tangga di Aceh Barat mengkonsumsi kebutuhan makanan dan non makanan dengan total nilai 2,41 trilyun rupiah. Angka ini terus membengkak hingga mencapai 3,28 trilyun rupiah pada tahun 2016.

Nilai Komponen konsumsi rumah tangga sebagian besar (52 persen) berasal dari sub komponen konsumsi non makanan, sisanya diperoleh dari sub komponen konsumsi rumah tangga makanan. Artinya, rata-rata sekitar 48 persen konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga diperuntukkan untuk membeli kebutuhan makanan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat di Aceh Barat masih tergolong menengah. Apabila masyarakat di suatu daerah telah digolongkan berpendapatan tinggi, maka konsumsi non makananlah yang paling mendominasi.

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Aceh Barat. Artinya PDRB Aceh Barat paling banyak di belanjakan untuk konsumsi rumah tangga. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2016 kontribusi konsumsi rumah tangga terus meningkat, dari 50,90 persen pada tahun 2012 hingga mencapai 52,79 persen di tahun 2016. Hal ini dapat dipahami karena secara teori, selain tingkat pendapatan, faktor yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga adalah pertumbuhan penduduk. Penduduk Aceh Barat sendiri selalu bertambah dari tahun ke tahun sekitar 2 persen.

Dengan melihat pola konsumsi rumah tangga, kita juga dapat melihat tingkat kualitas dan kemajuan suatu masyarakat. Dari jumlah konsumsi rumah tangga tersebut, hampir separuhnya atau sebesar 24-26 persen digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan dan terus meningkat setiap tahunnya dari nilai 1,15 trilyun rupiah di tahun 2012 menjadi 1,62 trilyun rupiah pada tahun 2016. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2-3 persen. Yaitu 0,12 trilyun di tahun 2012 menjadi 0,16 trilyun di tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Barat belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan.

Pengeluaran rumah tangga juga lumayan besar dihabiskan untuk transportasi, komunikasi dan rekreasi yaitu sebesar 10 persen dengan nilai mencapai 0,47 trilyun di tahun 2012 dan terus bertambah hingga 0,62 trilyun di tahun 2016. Kenaikan harga bahan bakar di tahun 2014 ikut memberi andil bagi besarnya pengeluaran masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ini.

Tabel 4.1 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Juta Rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.414.565,64	2.599.406,67	2.853.663,17	3.058.758,91	3.282.954,14
a. Makanan, Minuman & Rokok	1.159.823,05	1.241.087,16	1.361.947,10	1.476.150,91	1.629.580,71
b. Pakaian & Alas Kaki	150.207,60	163.659,64	179.581,65	191.192,96	201.345,63
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	329.628,16	357.467,71	388.095,54	418.604,03	439.844,01
d. Kesehatan & Pendidikan	126.690,02	133.200,38	143.752,18	152.978,48	162.179,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	479.848,66	519.015,22	578.860,14	609.334,86	629.069,83
f. Hotel & Restoran	91.085,75	98.845,76	109.751,17	113.990,72	120.221,58
g. Lainnya	77.282,39	86.130,79	91.675,39	96.506,93	100.712,39

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selain itu, belanja rumah tangga juga ikut tersedot untuk keperluan perumahan, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 7 persen dengan nilai 329 milyar di tahun 2012 dan bertambah terus hingga mencapai 439 milyar ditahun 2016. Hal ini ikut dipengaruhi dengan kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2014 kemarin. Sedangkan subkomponen lain memberikan kontribusi kecil sekitar 1-3 persen setiap tahunnya.

Tabel 4.2 Distribusi Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,90	51,44	52,18	52,42	52,79
a. Makanan, Minuman & Rokok	24,45	24,56	24,90	25,30	26,20
b. Pakaian & Alas Kaki	3,17	3,24	3,28	3,28	3,24
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,95	7,07	7,10	7,17	7,07
d. Kesehatan & Pendidikan	2,67	2,64	2,63	2,62	2,61
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10,12	10,27	10,58	10,44	10,11
f. Hotel & Restoran	1,92	1,96	2,01	1,95	1,93
g. Lainnya	1,63	1,70	1,68	1,65	1,62

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.1.2 Laju Pertumbuhan

Pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2012-2016 ini selalu bernilai positif mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Di tahun 2012-2016 konsumsi rumah tangga ini tumbuh sebesar 3 persen sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Sementara pada tahun 2015 komponen ini mampu tumbuh 4,04 persen dibanding tahun sebelumnya.

Untuk mengontrol laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kita harus melihat subkomponennya. Pertumbuhan sub komponen makanan selama lima tahun sekitar 2-4 persen. Di tahun 2012 konsumsi makanan oleh rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat naik 2,65 persen dibanding tahun 2011. Angka ini cenderung naik pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,11	3,08	3,73	4,04	3,35
a. Makanan, Minuman & Rokok	2,65	3,61	3,70	3,82	3,09
b. Pakaian & Alas Kaki	2,44	2,08	3,77	3,30	3,01
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,99	2,54	3,64	4,82	4,39
d. Kesehatan & Pendidikan	3,26	1,74	3,37	3,04	3,00
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,31	2,64	4,07	4,67	3,46
f. Hotel & Restoran	3,92	3,18	3,11	3,24	4,16
g. Lainnya	9,69	4,01	3,43	3,94	2,71

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sementara itu pertumbuhan sub komponen non makanan dalam lima tahun terakhir terbilang tinggi, mencapai 1-9 persen. Pertumbuhan ini menggambarkan tingkat pencapaian kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dibanding tahun 2014, sub komponen perumahan dapat tumbuh sebesar 4,82 persen di tahun 2015. Begitu juga dengan subkomponen hotel & restoran yang mampu tumbuh sekitar 4,16 persen di tahun 2016. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table 4.3

Pertumbuhan subkomponen non makanan ini selain disebabkan oleh pertumbuhan penduduk juga disebabkan oleh perbaikan taraf kesejahteraan penduduk. Menilik dari pertumbuhan penduduk yang selalu dibawah 3 persen, pertumbuhan konsumsi non makanan sisanya lebih disebabkan oleh taraf kehidupan masyarakat yang terus membaik. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan subkomponen ini dapat terus meningkat.

4.1.3 Laju Indeks Implisit

Tingginya peningkatan konsumsi rumah tangga selama empat tahun terakhir tersebut selain disebabkan oleh naiknya pola konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, melainkan juga disebabkan oleh kenaikan harga barang. Tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, nilai konsumsi rumah tangga tetap bertambah setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan tahun 2010 yang terus meningkat.

Tabel 4.4 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK (Juta Rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.274.951,29	2.345.102,97	2.432.480,08	2.530.703,72	2.615.563,90
a. Makanan, Minuman & Rokok	1.109.980,65	1.150.008,80	1.192.582,01	1.238.184,12	1.276.487,36
b. Pakaian & Alas Kaki	135.166,02	137.976,73	143.184,14	147.916,22	152.368,50
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	299.032,02	306.633,29	317.794,15	333.104,67	347.744,25
d. Kesehatan & Pendidikan	115.061,93	117.063,76	121.009,77	124.685,33	128.431,99
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	459.388,41	471.496,58	490.696,71	513.605,50	531.354,98
f. Hotel & Restoran	80.063,15	82.605,42	85.171,25	87.930,67	91.588,58
g. Lainnya	76.259,12	79.318,40	82.042,05	85.277,22	87.588,23

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Hal yang erat kaitannya dengan tingkat konsumsi rumah tangga adalah tingkat inflasi atau tingkat kenaikan harga-harga. Tingkat inflasi dari konsumsi rumah tangga dan subkomponen pembentuknya digambarkan dengan laju indeks implisitnya.

Pada tahun 2012, laju implisit yang terbentuk adalah 2,12 persen. Angka ini cenderung tidak terlalu tinggi. Naiknya harga bahan bakar dan tarif dasar listrik membuat laju implisit di tahun 2013 tercatat 4,43 persen. Melemahnya rupiah membuat harga-harga kembali melambung di tahun 2014 mencapai 5,84 persen. Selama tahun 2015-2016 perubahan harga kembali terkontrol di angka 3 persen.

Perubahan harga pada subkomponen makanan relatif sama dengan laju implisit komponen konsumsi rumah tangga yang sempat terkontrol di tahun 2012 pada angka 1,43 persen lalu cenderung naik di tahun 2014 mencapai level 5,82 persen dan kembali melambat sepanjang tahun 2015 (3,86 persen). Sementara itu, di tahun 2016 harga makanan menembus dengan signifikan sebesar 7,08 persen.

Tabel 4.5 Laju Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,12	4,43	5,84	3,03	3,85
a. Makanan, Minuman & Rokok	1,43	3,28	5,82	4,39	7,08
b. Pakaian & Alas Kaki	1,44	6,74	5,74	3,06	2,23
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,01	5,76	4,76	2,90	0,65
d. Kesehatan & Pendidikan	2,99	3,34	4,40	3,28	2,92
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	0,94	5,38	7,17	0,57	(0,21)
f. Hotel & Restoran	7,20	5,18	7,69	0,60	1,25
g. Lainnya	(1,53)	7,15	2,90	1,28	1,60

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.1.4 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga.

Dengan jumlah penduduk sebesar 182.364 jiwa, bisa dikatakan bahwa rata-rata konsumsi masyarakat Aceh Barat selama tahun 2012 adalah 13,24 juta rupiah per tahun atau senilai 1,10 juta rupiah per bulan. Bila diasumsikan satu rumah tangga terdiri atas empat anggota rumah tangga (ayah, ibu dan dua orang anak) maka selama tahun 2012, rata-rata konsumsi rumah tangga di Aceh Barat sebanyak 4,41 juta rupiah per bulan.

Angka ini terus bertambah di tahun-tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga perkapita di Aceh Barat tercatat sebesar 16,59 juta rupiah pertahun atau 1,38 juta per bulan dan 5,53 juta rupiah per rumah tangga tiap bulannya. Dengan asumsi setiap rumah tangga terdiri dari empat anggota rumah tangga.

Bila dilihat per subkomponen, rata-rata konsumsi makanan rumah tangga yang beranggotakan empat orang adalah 2,12 sampai 2,74 juta rupiah per bulannya atau 530 sampai 685 ribu rupiah per orang per bulan. Dengan asumsi setiap bulannya berjumlah tiga puluh hari, maka setiap penduduk Aceh Barat akan mengkonsumsi makanan setara dengan Rp. 17.000,- di tahun 2012 dan Rp. 22.000 rupiah ditahun 2016.

Tabel 4.6 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Aceh Barat Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13,24	13,87	15,00	15,78	16,59
a. Makanan, Minuman & Rokok	6,36	6,62	7,16	7,62	8,23
b. Pakaian & Alas Kaki	0,82	0,87	0,94	0,99	1,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,81	1,91	2,04	2,16	2,22
d. Kesehatan & Pendidikan	0,69	0,71	0,76	0,79	0,82
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	2,63	2,77	3,04	3,14	3,18
f. Hotel & Restoran	0,50	0,53	0,58	0,59	0,61
g. Lainnya	0,42	0,46	0,48	0,50	0,51

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sedangkan pada subkomponen non makanan, rata-rata tiap warga Aceh Barat menghabiskan 2,63 juta rupiah (tahun 2012) hingga 3,18 juta rupiah (tahun 2016) setahun untuk transportasi, atau 219 -265 ribu rupiah per bulannya. Sedangkan untuk subkomponen perumahan, selama lima tahun terakhir rata-rata penduduk Aceh Barat menghabiskan uang 1,81-2,22 juta rupiah pertahun, atau 7,24-8,88 juta rupiah per rumah tangga. Disini juga termasuk perkiraan rumah milik sendiri. Sedangkan kebutuhan kesehatan maupun pendidikan penduduk Aceh Barat setiap tahunnya berkisar antara 690-820 ribu rupiah per tahun atau hanya 57-68 ribu rupiah perbulan.

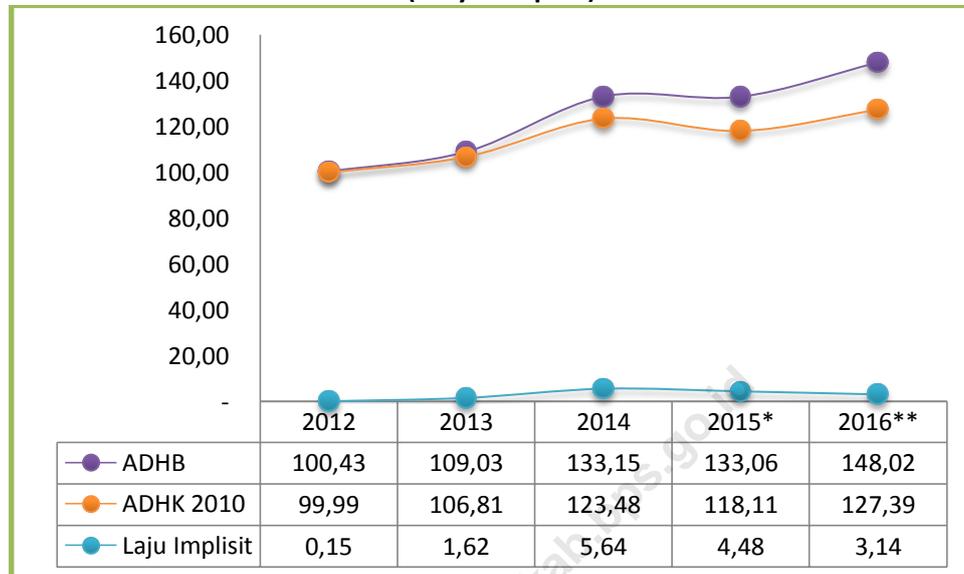
4.2 KONSUMSI LEMBAGA NON-PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (LNPR)

Lembaga swasta nirlaba dalam Kabupaten Aceh Barat berupa lembaga keagamaan (perkumpulan remaja masjid, wirid, tempat pengajian, dll), organisasi sosial (panti asuhan), organisasi profesi (IBI, IDI, Gapensi, dll), Perkumpulan kebudayaan/olah raga/hobi (sanggar tari, perkumpulan olah raga, arisan, dll), LSM asing maupun lokal, Partai Politik, serta Organisasi Kemasyarakatan (Muhammadiyah, NU, dll). Lembaga swasta tanpa tujuan menghasilkan laba yang dicakup disini adalah yang melayani rumah tangga.

Konsumsi lembaga swasta tanpa laba dalam Kabupaten Aceh Barat tergolong kecil. Pengeluaran PDRB untuk membiayai komponen ini di tahun 2012 adalah 100,43 milyar rupiah. Pada tahun 2013 dan 2014, belanja lembaga swasta nirlaba Kabupaten Aceh Barat berkisar antara 109,03 hingga 133,15 milyar rupiah. Sebagian besar belanja komponen ini disumbang oleh konsumsi lembaga keagamaan, diikuti oleh LSM dan Partai Politik. Selama pemilihan kepala daerah (Bupati) pada tahun 2011 hingga 2012 kemarin, konsumsi partai politiklah yang lebih mendominasi. Sedangkan selama tahun 2014 nilainya melonjak menjadi 133,15 milyar rupiah dengan adanya

pemilihan wakil rakyat dan pemilihan presiden. Dalam tahun 2015 pengeluaran komponen ini turun di angka 133,06 milyar rupiah. Pada tahun 2016 nilai ini melonjak dengan adanya pemilihan kepala daerah (Bupati Aceh Barat) sebesar 148,02 milyar rupiah.

Gambar 4.1 Nilai Komponen LNPRT Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Milyar Rupiah)



*Angka Sementara

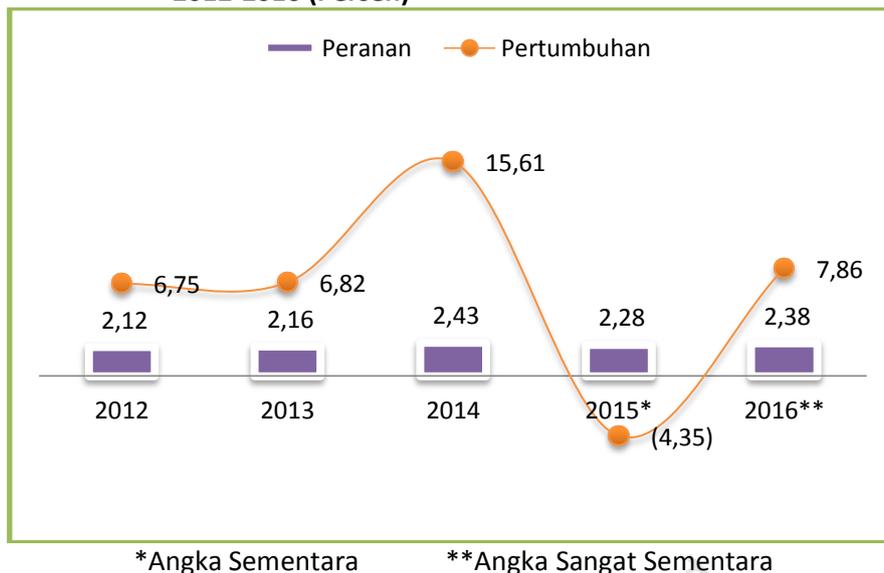
**Angka Sangat Sementara

Nilai komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba diatas masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, untuk melihat kenaikan murni konsumsi komponen ini dipakailah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. Selama lima tahun terakhir, konsumsi Komponen Lembaga Swasta Nirlaba ini terus meningkat dari 99,99 milyar rupiah di tahun 2012 hingga 127,39 milyar rupiah di tahun 2016.

Adanya jarak antara kedua nilai tersebut menandakan bahwa kenaikan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Barat terus terjadi. Yaitu sebesar 0,15 dan 1,62 persen di tahun 2012 dan 2013. Lalu kembali naik sebesar 5,64 di tahun 2014 dengan adanya pemilihan presiden. Kenaikan harga ini lebih stabil di angka 4,48 persen di tahun 2015 dengan tidak adanya pertarungan politik pada tahun tersebut. Pada tahun 2016 kenaikan harga di komponen ini sebesar 3,14 persen.

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB Aceh Barat masih sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun terus mengalami peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) rata-rata kontribusi komponen ini kurang lebih dua persen. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa komponen ini sebagai motor penggerak perekonomian Aceh Barat. Tercatat dari tahun 2012-2016 kontribusi tertinggi konsumsi LNPRT hanya sebesar 2,43 persen di tahun 2014 dengan adanya Pemilihan presiden.

Gambar 4.2 Peranan dan Pertumbuhan Komponen LNPRT Aceh Barat, 2012-2016 (Persen)



Pertumbuhan komponen ini erat kaitannya dengan nilai PDRB komponen lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan. Pada tahun 2012, pengeluaran komponen ini dapat meningkat sebesar 6,75 persen seiring dengan pelaksanaan Pilkada Aceh Barat di pertengahan tahun. Sementara di tahun 2013 komponen ini tumbuh sebesar 6,82 persen. Hal ini wajar mengingat tahun tersebut komponen ini hanya ditopang oleh lembaga keagamaan.

Pengeluaran partai politik yang membengkak selama Pemilu di tahun 2014 menyebabkan pertumbuhan komponen ini melejit di tahun tersebut sebesar 15,61 persen. Tidak adanya gejolak politik menyebabkan pertumbuhan komponen ini malah mengalami kontraksi sebesar 4,35 persen di tahun 2015. Pemilihan kepala daerah pada awal 2017 membuat komponen ini tumbuh pesat selama tahun 2016 mencapai hingga 7,86 persen.

4.3. KONSUMSI PEMERINTAH

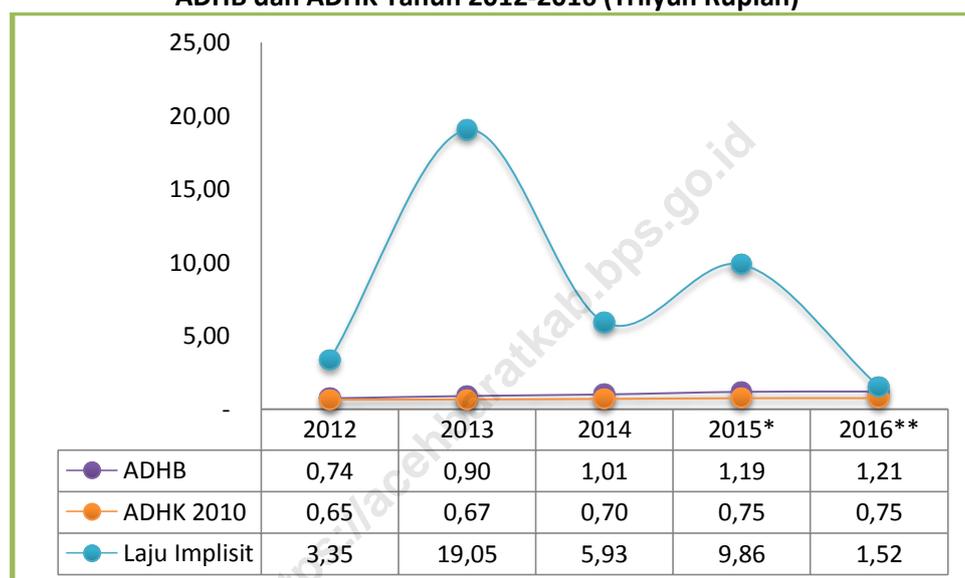
Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam perekonomian Aceh Barat memiliki peranan yang cukup besar, hal ini karena komponen ini menempati urutan keempat terbesar dalam PDRB. Komponen konsumsi pemerintah ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat beserta pemerintah daerah (sampai dengan level desa).

Nilai komponen ini semakin bertambah setiap tahunnya dari 740 milyar rupiah di tahun 2012 menjadi 1,21 triliun rupiah selama tahun 2016. Hal ini seiring dengan penambahan alokasi

dana (baik APBK maupun APBA) dan juga penambahan PNS vertikal/daerah, TNI/Polri serta aparatur desa. Selain itu, peningkatan tunjangan kerja dan renumerasi di beberapa instansi vertikal dan tubuh TNI/Polri juga ikut andil dalam mendongkrak nilai komponen tersebut. Subsidi Raskin dan transfer bantuan sosial lainnya yang dilakukan oleh pemerintah ikut tercakup disini.

Bila dilihat atas dasar harga konstan Tahun 2010, konsumsi pemerintah ini menghabiskan dana sebesar 650 -750 milyar rupiah selama lima tahun terakhir. Perbedaan nilai komponen antara kedua harga ini disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi setiap tahunnya.

Gambar 4.3 Nilai Komponen Konsumsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB Aceh juga mengalami peningkatan. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Peranan komponen ini terus berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2012 konsumsi pemerintah ini menopang perekonomian Aceh Barat sebesar 15,62 persen. Semakin besarnya dana yang digelontorkan Pemerintah untuk APBK, APBA dan APBN membuat setiap tahunnya peranan komponen ini terus menguat mencapai angka 19,41 persen di tahun 2016.

Belanja komponen pemerintah diatas sebagian besar diperuntukkan untuk belanja aparatur daerah dan belanja barang untuk kinerja aparatur daerah, hanya sebagian kecil yang disalurkan untuk bantuan sosial. Aparatur daerah di Aceh Barat ini sebagian besar diisi oleh PNS daerah dan

aparatur desa, kemudian diikuti oleh petugas TNI/Polri dan sisanya diisi oleh PNS instansi vertikal. Penambahan pegawai setiap tahunnya, terutama PNS daerah, sebaiknya dievaluasi harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Amat disayangkan apabila penambahan pegawai yang dilakukan hanya akan membebani belanja pemerintah daerah, akan tetapi tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat maupun kinerja pemerintahan umumnya. Untuk itu, optimalisasi kinerja aparatur daerah yang telah ada akan lebih baik dilakukan daripada menambah jumlah aparatur daerah yang baru.

Gambar 4.4 Peranan dan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



Pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah ini selalu bernilai positif (meningkat) setiap tahunnya. Selama tahun 2012 komponen ini mampu tumbuh sebesar 2,46 persen. Di tahun berikutnya komponen ini meningkat lebih besar mencapai 2,47 dan 5,29 persen di tahun 2013 dan 2014. Kemudian di tahun 2015 komponen ini tumbuh mencapai 7,18 persen. Sementara di tahun 2016 komponen ini hanya bertambah sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan tajam di tahun ini juga disebabkan adanya lonjakan biaya bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, seperti halnya untuk pemberian Raskin, Program Keluarga Harapan, BLSM dan sejenisnya serta transfer pemerintah kepada desa.

4.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

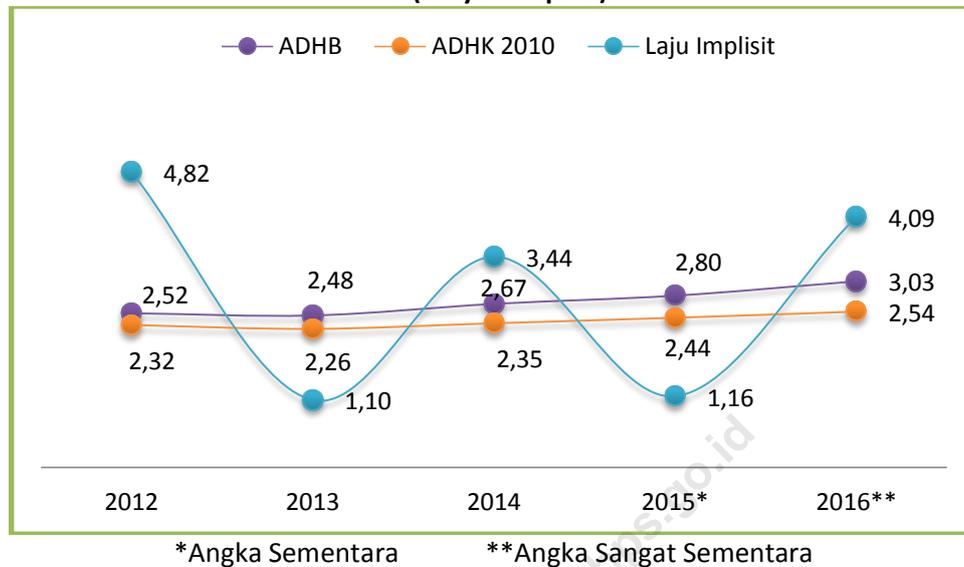
Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini penting untuk diperhatikan karena merupakan aset investasi daerah. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah yang bersifat pengeluaran/belanja, sebaliknya komponen ini malah akan menghasilkan output ekonomi terhadap daerah. Betapa tidak, yang termasuk dalam komponen ini adalah pengerjaan konstruksi (baik bangun baru maupun perbaikannya); pembelian mesin, perlengkapan dan alat transportasi; serta perluasan perkebunan dan penanaman baru (khusus untuk tanaman yang menghasilkan berulang, semisal karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, kopi dll) yang notabene merupakan sarana untuk menghasilkan produksi penunjang bertambahnya nilai PDRB Aceh Barat selanjutnya. Oleh karena itu, pengeluaran PDRB untuk komponen ini diharapkan semakin besar setiap tahunnya.

Nilai komponen PMTB pada PDRB Pengeluaran berasal dari output/produksi sektor konstruksi pada PDRB Lapangan Usaha yang disebut subkomponen bangunan. Selain itu ada pula yang disebut subkomponen non bangunan yang berupa penambahan aset oleh pemerintah daerah dan perusahaan besar di Aceh Barat seperti penambahan mesin, perlengkapan, alat transportasi penanaman baru tanaman perkebunan yang menghasilkan berulang dan biaya eksplorasi/evaluasi pada awal proses penambangan.

PMTB Kabupaten ini sebesar 2,52 trilyun rupiah di tahun 2012 dengan penyelesaian perbaikan jalan dan jembatan di samatiga. Selanjutnya proses pembangunan pelabuhan ekspor batubara dan penanaman baru tanaman perkebunan baik oleh perkebunan besar yang telah lama berdiri maupun oleh perusahaan besar perkebunan yang baru masuk ke Aceh Barat mendorong PMTB Kabupaten ini di tahun 2013 mencapai 2,48 trilyun. Selama tahun 2014 PMTB daerah ini mencapai angka 2,67 trilyun rupiah dengan dibangunnya terminal, pelabuhan batubara dan pelabuhan penyeberangan. Angka ini kembali bertambah menjadi 2,8 trilyun rupiah di tahun 2015 dengan adanya penyelesaian pelabuhan batubara, penyelesaian pelabuhan penyeberangan serta perbaikan jalan dan jembatan di Aceh Barat. Di tahun 2016 terus mengalami peningkatan hingga

menembus 3,03 triliun rupiah dengan adanya perbaikan besar jalan dan jembatan di sekitar Meulaboh serta pembangunan gedung olahraga di daerah Meureubo.

Gambar 4.5 Nilai Komponen PMTB Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



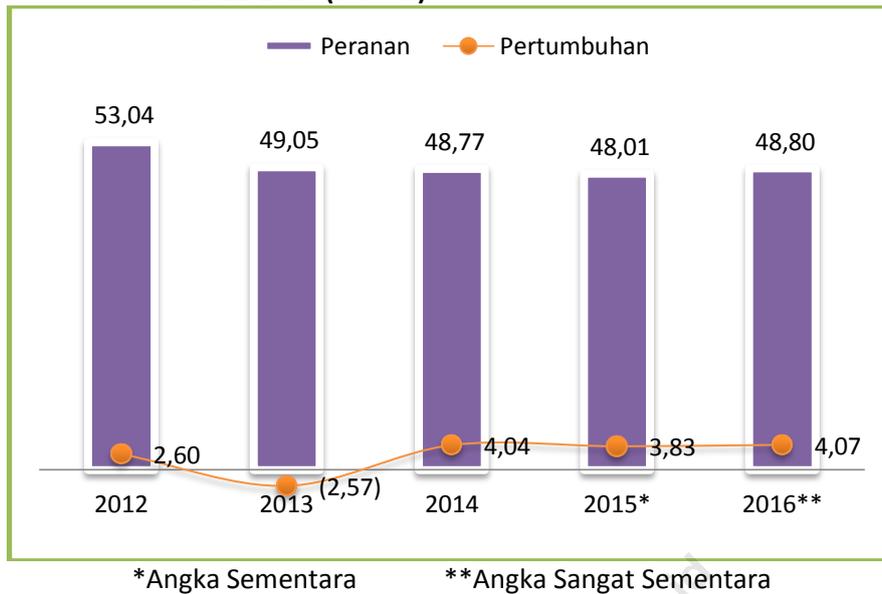
Tanpa dipengaruhi oleh kenaikan harga barang, pola PMTB Aceh Barat atas dasar harga konstan tahun 2012-2016 tidak berbeda dengan pola PMTB Aceh Barat atas dasar harga berlaku. Perbedaan nilai kedua angka ini hanya disebabkan kenaikan harga barang dan jasa tiap tahunnya yang mempengaruhi nilai atas dasar harga berlaku.

Laju implisit yang terjadi selama periode 2012 cukup signifikan diangka 4,82 persen per tahun. Seperti kita ketahui bahwa pada saat itu dilakukan penyelesaian jalan dan jembatan Aceh Barat-Calang sehingga terjadi kenaikan harga ongkos produksi yang cukup signifikan.

Selama tahun 2013 komponen ini mengalami stagnansi harga dikarenakan berkurang drastisnya nilai subkomponen non bangunan dengan berproduksinya tambang batubara. Selama tahun 2014 laju implisit komponen ini kembali normal diangka 3,44 persen. Perkembangan harga hanya terjadi disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Dalam tahun 2015 relatif kurang terjadi perkembangan harga dalam kategori ini (1,16 persen). Sementara di tahun 2016 kenaikan harga kembali signifikan sebesar 4,09 persen. Tingginya harga di tahun ini karena besarnya nilai jual CPO sehingga akan menaikkan nilai tambah tanaman yang belum menghasilkan untuk kelapa sawit.

Peranan komponen PMTB ini merupakan yang terbesar kedua setelah komponen konsumsi rumah tangga. Peranan komponen ini di tahun 2012 cukup tinggi mencapai 53,04 persen dengan masuknya investasi tambang ke Aceh Barat. Berproduksinya perusahaan tambang batubara membuat peranan yang terbentuk kembali melemah di tahun 2013-2016 menjadi 48-49 persen.

Gambar 4.6 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



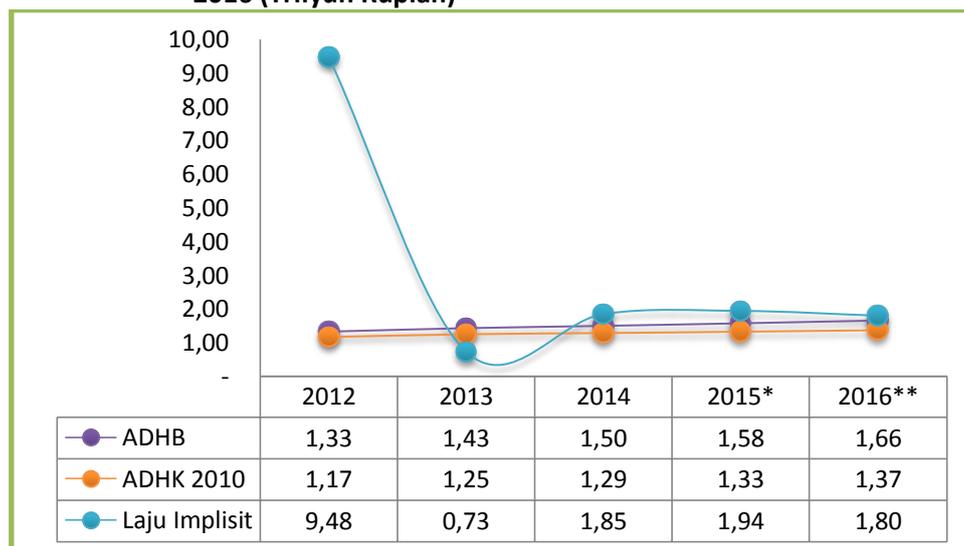
Pertumbuhan komponen ini selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Dengan mulai berproduksinya perusahaan tambang pada akhir 2012 membuat pertumbuhan komponen ini lebih melambat bahkan sempat menurun di tahun 2013 (minus 2,57 persen). Selama tahun 2014-2016 komponen ini kembali dapat tumbuh positif pada angka 4 persen.

4.4.1 Subkomponen PMTB Bangunan

Nilai komponen PMTB pada PDRB Pengeluaran yang berasal dari output/produksi sektor konstruksi pada PDRB Lapangan Usaha disebut subkomponen bangunan. Nilai subkomponen ini lebih mendominasi komponen PMTB. Selama tahun 2012-2016 nilainya terus bertambah dari 1,33 triliun menjadi 1,66 triliun rupiah.

Laju implisit subkomponen bangunan juga berfluktuasi. Selama proses penyelesaian jalan dan jembatan lintas Meulaboh-Calang dalam tahun 2012 menyebabkan laju implisit sebesar 9,48 persen. Kenaikan harga ini tidak terlalu melonjak di tahun 2013 (hanya 0,73 persen). Kenaikan harga barang di tahun 2014 hingga 2016 menyebabkan laju implisit pada tahun tersebut mencapai angka hampir 2 persen.

Gambar 4.7 Nilai PMTB Bangunan Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)

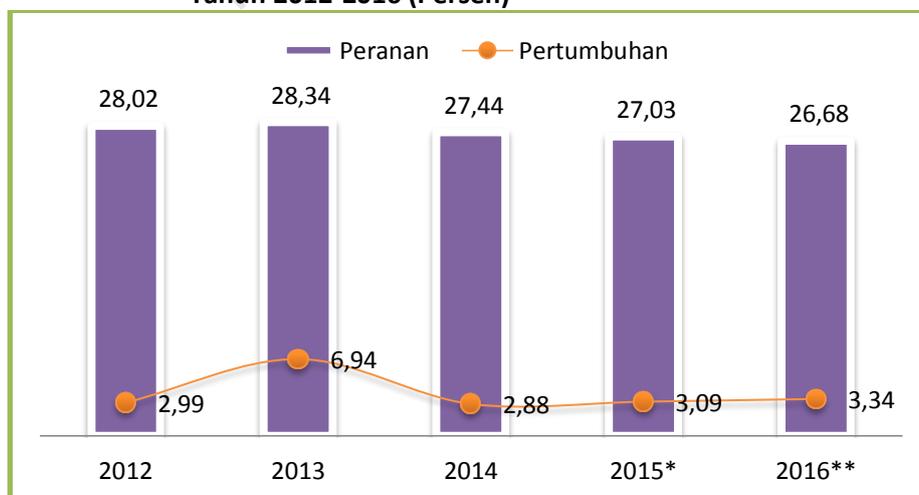


*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Peranan subkomponen terhadap PDRB pengeluaran Aceh Barat tergolong tinggi setiap tahunnya. Selama tahun 2012 subkomponen ini menyumbang perekonomian sebesar 28,02 persen dan terus bertambah menjadi 28,34 persen di tahun 2013 dengan selesainya pembangunan jalan lintas meulaboh Calang. Selanjutnya angka ini menurun menjadi 27,44 di tahun 2014 dengan selesainya pembangunan terminal di wilayah Meureubo. Selama tahun 2015-2016 peranan yang terbentuk sekitar 27 persen.

Gambar 4.8 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Bangunan Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan sub komponen PMTB bangunan ini selalu bernilai positif selama 5 tahun terakhir. Nilainya bervariasi antara 2-7 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi dalam

tahun 2013 mencapai 6,94 persen. Selama tahun 2015-2016 pembangunan jalan dan pelabuhan di Kecamatan Samatiga membuat subkomponen PMTB bangunan ini mampu tumbuh sebesar 3 persen.

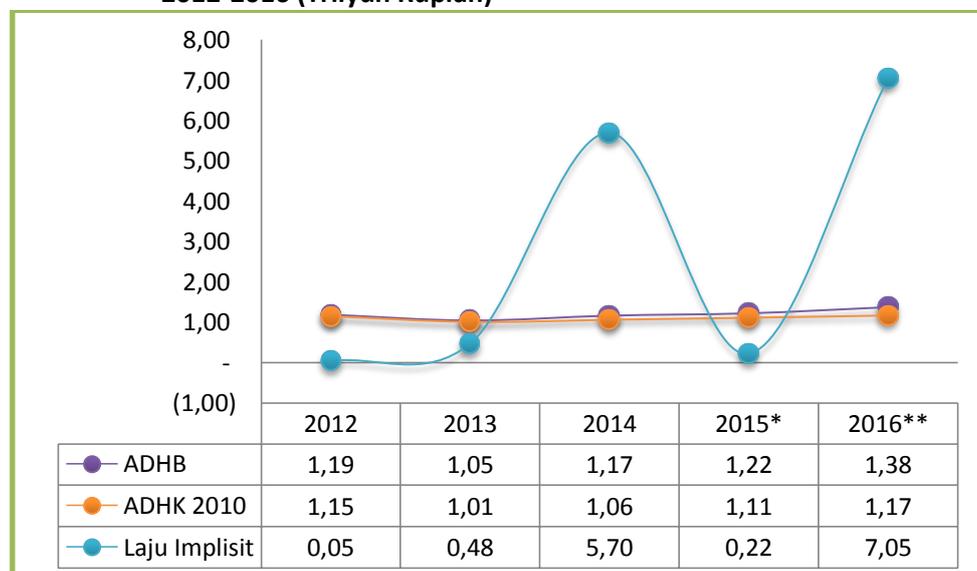
4.4.2 Subkomponen PMTB non Bangunan

Selain subkomponen bangunan, ada pula yang disebut subkomponen non bangunan yang berupa penambahan aset oleh pemerintah daerah dan perusahaan besar di Aceh Barat seperti penambahan mesin, perlengkapan, alat transportasi penanaman baru tanaman perkebunan yang menghasilkan berulang dan biaya eksplorasi/evaluasi pada awal proses penambangan.

Nilai Sub Komponen ini ditahun 2012 mencapai 1,19 trilyun rupiah dengan besarnya biaya eksplorasi dan evaluasi pertambangan. Selanjutnya dalam tahun 2013 dengan berproduksinya pertambangan maka pengeluaran Aceh Barat untuk pembentukan PMTB non bangunan menurun menjadi 1,05 trilyun rupiah. Selama tahun 2014-2016 belanja subkomponen ini mencapai 1,17 hingga 1,38 trilyun rupiah.

Laju implisit subkomponen ini sangat berfluktuasi. Selama tahun 2012 angkanya mencapai 0,05 persen dan terus meningkat hingga menjadi 5,70 persen di tahun 2014. Selanjutnya sepanjang tahun 2015 kenaikan harga pada komponen PMTB non bangunan hanya sebesar 0,22 persen. Sedangkan pada tahun 2016 kenaikan harga di komponen ini meningkat secara signifikan mencapai 7,05 persen.

Gambar 4.9 Nilai PMTB Non Bangunan Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Peranan subkomponen ini sepanjang tahun 2012 cukup tinggi mencapai angka 25,02 persen. Pertumbuhan ekonomi subkomponen ini ditahun yang sama tumbuh 2,21 persen dengan semakin populernya tanaman perkebunan di Aceh Barat dan semakin gencarnya kegiatan eksplorasi mineral. Berakhirnya masa eksplorasi menjadikan pertumbuhan subkomponen ini berkontraksi sebesar 12,25 persen dengan kontribusi yang hanya sebesar 20,71 persen di tahun 2013. Dalam tahun 2014 subkomponen ini mampu tumbuh 5,46 persen dengan banyak masuknya investasi di Aceh Barat. Peranan yang terbentuk sekitar 21,33 persen. Selama tahun 2015-2016 pertumbuhan subkomponen ini mencapai sekitar 4 persen dengan peranan sebesar 20-22 persen.

Gambar 4.10 Peranan dan Pertumbuhan PMTB Non Bangunan Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



4.5 PERUBAHAN INVENTORI

Seperti juga halnya komponen PMTB sebelumnya, komponen perubahan inventori ini juga merupakan aset untuk pemerintah daerah. Perubahan inventori ini berupa hasil produksi/barang dagangan yang belum terjual, bahan baku/bahan penolong/bahan setengah jadi yang belum diolah, populasi ternak yang belum dipotong, serta stok beras dan gula oleh pemerintah. Barang-barang tersebut akan mendatangkan pemasukan ke daerah apabila telah terjual nantinya. Perubahan inventori ini dihitung dengan melihat selisih antara keadaan akhir tahun dan awal tahun.

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen perubahan inventori tidak banyak dikaji lebih.

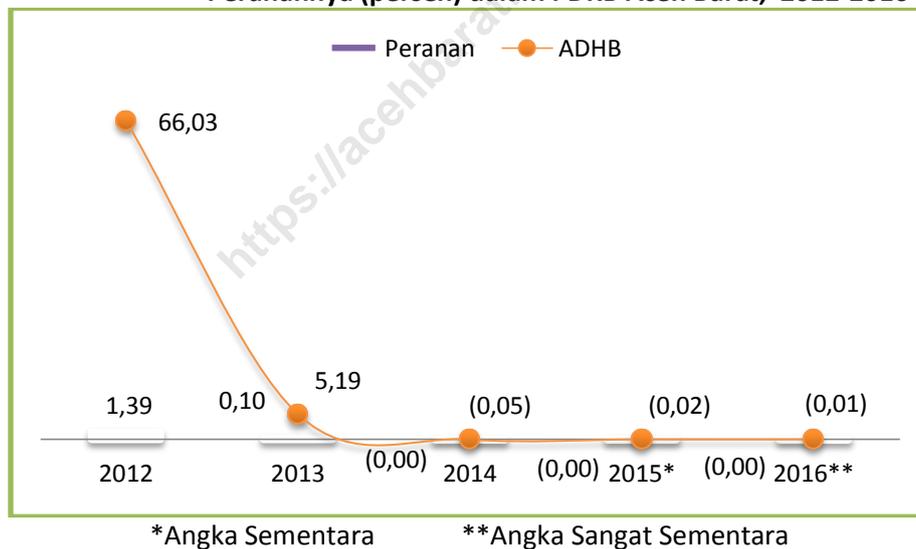
Selama periode tahun 2012-2016, nilai perubahan inventori cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nilai nominal perubahan inventori ADHB tertinggi terjadi di tahun 2012 sebesar 66 miliar

rupiah dengan masih banyaknya bahan konstruksi berasal dari bahan bangunan dan proses pengerjaan jalan yang belum selesai. Tidak banyaknya proyek konstruksi di tahun 2013 yang belum rampung menjadikan posisi persediaan di akhir tahun tersebut hanya tercatat 5,19 milyar rupiah.

Bahkan pada tahun 2014-2016 ini posisi stok akhir tahun berkurang 50 juta rupiah, 20 juta rupiah dan 10 juta rupiah dibandingkan pada awal tahun. Hal ini dikarenakan banyak bahan konstruksi yang terpakai dan banyaknya bahan dagangan yang terjual. Pada kasus perniagaan, terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran produk tidak berjalan dengan sempurna.

Kontribusi perubahan inventori terhadap PDRB merupakan yang terkecil dari seluruh komponen. Peranan komponen ini selama tahun 2012-2016 terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 0-1 persen dan terus menurun. Pada tahun 2012, peranan perubahan inventori terhadap pembentukan PDRB Aceh Barat adalah sebesar 1,39 persen dengan semakin besarnya nilai selisih stok yang terbentuk. Selama tahun 2013-2016 peranan komponen ini hanya sebesar 0 persen. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 4.11 Nilai Komponen Perubahan Inventori (milyar rupiah) dan Peranannya (persen) dalam PDRB Aceh Barat, 2012-2016



4.6 EKSPOR

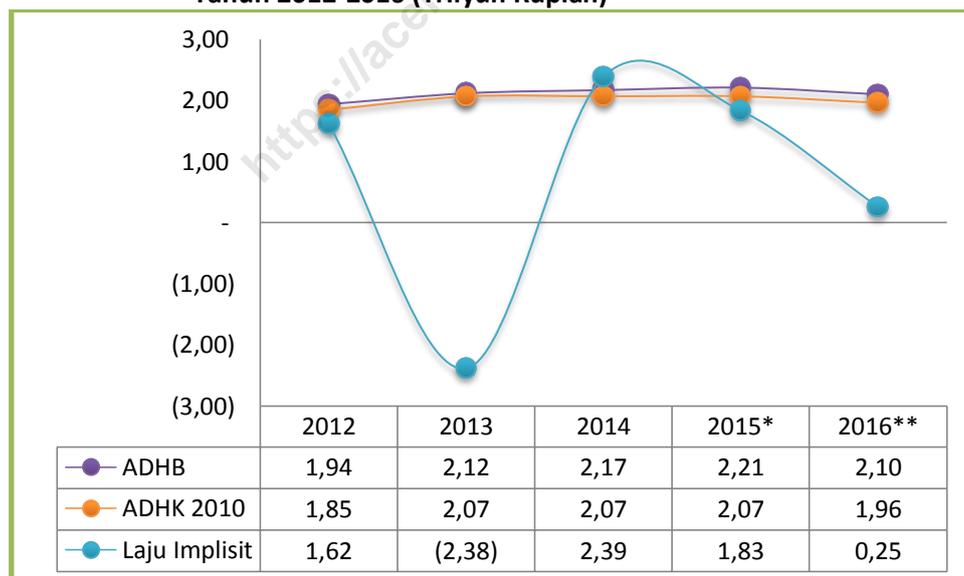
Arus perdagangan suatu daerah tidak akan terlepas dari pengaruh daerah luar. Dalam kehidupan ekonomi suatu daerah, arus barang keluar masuk daerah pasti akan terjadi. Hasil produksi suatu daerah selain dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut juga akan diekspor keluar daerah, baik keluar kabupaten, keluar provinsi maupun ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan masyarakat suatu daerah apabila tidak diproduksi di daerah tersebut maka akan

didatangkan dari luar daerah, baik dari luar kabupaten, luar provinsi maupun luar negeri. Barang/jasa hasil produksi dalam negeri yang dikirim keluar daerah dinamakan ekspor. Sedangkan barang/jasa hasil produksi luar daerah yang dimasukkan ke suatu daerah dinamakan impor.

Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah induk dan lebih maju dibanding daerah sekitar tentu banyak dimanfaatkan oleh kabupaten-kabupaten tetangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan saja tempat penginapan, taman bermain, rumah makan/restoran, sarana pendidikan (khususnya perguruan tinggi), tempat olah raga, alat angkutan umum dan usaha perdagangan. Banyak penduduk Kabupaten sekitar, terutama Nagan Raya dan Aceh Jaya yang memanfaatkan fasilitas ini. Hal ini tentu saja menguntungkan Kabupaten Aceh Barat

Selain melakukan ekspor keluar kabupaten, Aceh Barat juga melakukan ekspor keluar Provinsi, terutama ke Sumatera Utara. Komoditi perkebunan yang terutama diekspor adalah kelapa sawit, karet, nilam dan pinang serta hasil pertambangan berupa batubara. Sedangkan komoditi yang diekspor Aceh Barat keluar negeri adalah batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) dan hasil perikanan. Barang-barang tersebut dapat langsung diekspor keluar negeri ataupun dikirim dahulu ke Sumatera Utara untuk kemudian diekspor keluar negeri.

Gambar 4.12 Nilai Ekspor Kabupaten Aceh Barat ADHB dan ADHK Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

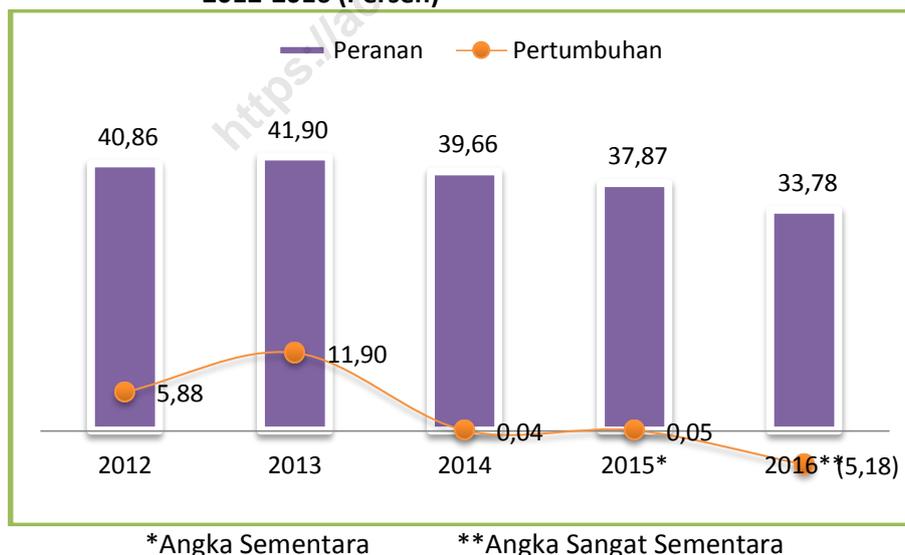
Selama tahun 2012, Nilai komponen ekspor Aceh Barat mencapai nilai 1,94 trilyun rupiah seiring dengan semakin besarnya produksi karet dan kelapa sawit. Selain makin bertambahnya komoditas ekspor bahan perkebunan, mulai memproduksi intensnya pertambangan batubara pada tahun 2013 menjadikan nilai komponen ini mencapai angka 2,12 trilyun rupiah di tahun tersebut.

Melejitnya produksi batubara sepanjang tahun 2014 dan makin berkembangnya produksi perkebunan membuat nilai komponen ini mencapai 2,18 trilyun rupiah. Sepanjang tahun 2015 komponen ini mencapai nilai 2,20 trilyun rupiah. Namun sayangnya, di tahun 2016 komponen ekspor mengalami penurunan menjadi 2,10 trilyun rupiah akibat terbatasnya produksi batu bara seiring dengan rendahnya harga batu bara duni di kala itu.

Selama tahun 2012 kenaikan harga pada komponen ekspor relatif tidak tinggi (1,94 persen). Rendahnya harga komoditi perkebunan di tahun 2013 menyebabkan penurunan harga komponen ini mencapai 2,38 persen. Selanjutnya dalam tahun 2014 kenaikan harga yang terjadi sekitar 2,39 persen. Barulah di tahun 2015 perkembangan harga komponen ini terkontrol di angka 1,83 persen. Sementara itu, perkembangan harga pada komponen ini pada tahun 2016 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen. Rendahnya harga batu bara dunia dan tingginya harga CPO menjadi pemicunya di kala itu.

Berbeda dengan PDRB sektoral yang hanya mencatat Nilai Tambah Bruto (NTB), nilai ekspor yang dimaksud pada komponen ini adalah harga jual barang tersebut. Sehingga nilai ekspor komponen ini akan jauh lebih besar daripada nilai tambah komoditi ekspor pada PDRB Lapangan Usaha.

Gambar 4.13 Peranan dan Pertumbuhan Ekspor Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)



Besarnya nilai komponen ini atas dasar harga berlaku, menjadikan komponen ini mempunyai kontribusi terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Aceh Barat menurut pengeluaran. Dari gambar diatas terlihat bahwa peranan komponen ini di tahun 2012 - 2013 terus menguat mencapai 40-42 persen. Selain semakin besarnya volume ekspor bahan perkebunan, ekspor batu bara dari Aceh Barat ke Aceh Besar untuk bahan bakar pabrik semen ikut menyebabkan hal ini. Selanjutnya selama

tahun 2014 hingga 2016 peranan komponen ini semakin melemah di angka 39,66 hingga 33,78 persen.

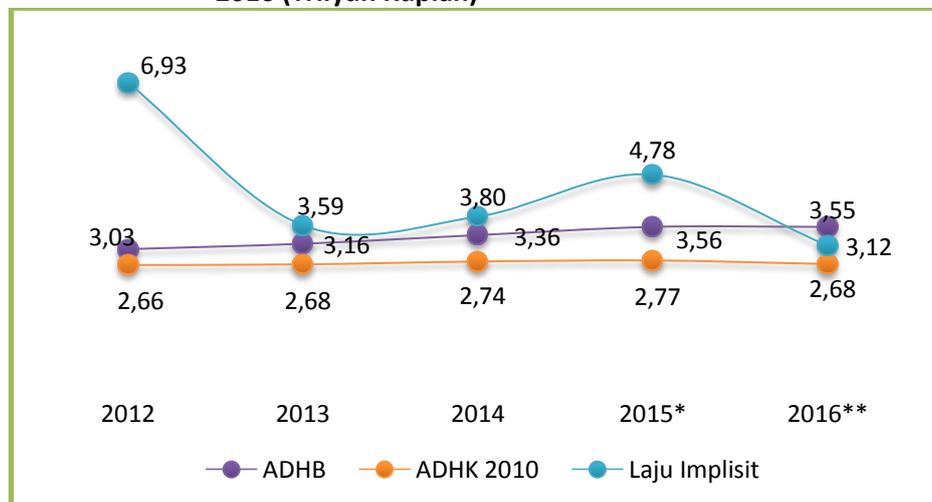
Pertumbuhan komponen ini sangat menggembirakan. Sepanjang tahun 2012 hingga 2013, komponen ini mampu tumbuh sebesar 5-12 persen per tahunnya. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun-tahun tersebut komoditi perkebunan Aceh Barat mulai maju pesat dan produksi tambang batubara semakin menjanjikan. Di tahun 2014-2015 pertumbuhan komponen ekspor ini berjalan stagnan pada level 0 persen. Sementara itu, pada tahun 2016 pertumbuhan komponen ini mengalami kontraksi sebesar 5,18 persen.

4.7 IMPOR

Disisi lain selain melakukan ekspor barang dan jasa, banyak kebutuhan masyarakat Aceh Barat yang tidak diproduksi di dalam daerah dan harus didatangkan dari luar. Seperti halnya sayuran (bawang, tomat), buah-buahan, pakaian jadi, makanan dan minuman jadi, bahan bangunan, barang elektronik, dan masih banyak lagi. Impor barang-barang ini tentu saja mengurangi nilai PDRB Aceh Barat.

Pada gambar terlihat bahwa nilai impor Aceh Barat amat tinggi, yaitu 3,03 Trilyun rupiah pada 2012 dan terus meningkat menyentuh angka 3,55 trilyun rupiah pada tahun 2016. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan komponen konsumsi rumah tangga dan komponen PMTB. Bila dilihat dari laju implisit, pada tahun 2012 Aceh Barat mengalami kenaikan harga impor tertinggi. Pada tahun-tahun selanjutnya kenaikan harga menjadi lebih terkontrol.

Gambar 4.14 Nilai Impor Aceh Barat ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2012-2016 (Trilyun Rupiah)



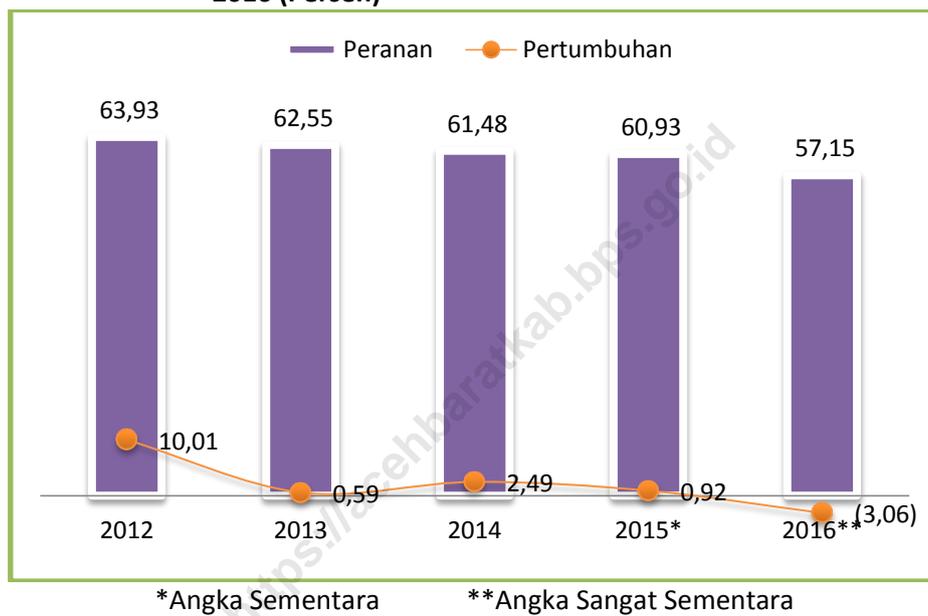
*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Peranan komponen ini sangat besar terhadap perekonomian Aceh Barat, yaitu mencapai 57-64 persen. Artinya sebesar 57-64 persen barang dan jasa harus dipasok dari luar untuk menggerakkan perekonomian Aceh Barat. Hal ini tentu sangat merugikan karena impor ini menjadi pengurang dalam perhitungan PDRB.

Komponen ini sejak tahun 2012 impor Aceh Barat terbilang tinggi dikarenakan eksplorasi dan evaluasi mineral. Hampir setiap tahun pertumbuhan di komponen impor tumbuh tidak signifikan. Sementara itu, di tahun 2016 mengalami kontraksi sebesar 3,06 persen.

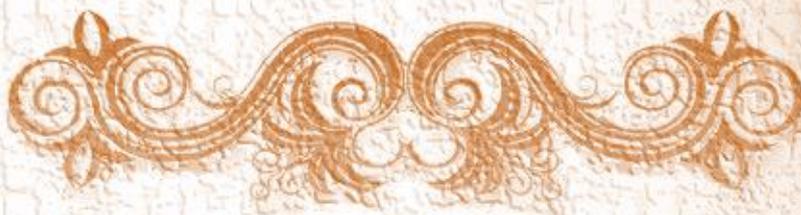
Gambar 4.15 Peranan dan Pertumbuhan Impor Aceh Barat Tahun 2012-2016 (Persen)





Lampiran

<https://acehbaratkab.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
(juta rupiah)**

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.414.565,64	2.599.406,67	2.853.663,17	3.058.758,91	3.282.954,14
a Makanan, Minuman & Rokok	1.159.823,05	1.241.087,16	1.361.947,10	1.476.150,91	1.629.580,71
b Pakaian & Alas Kaki	150.207,60	163.659,64	179.581,65	191.192,96	201.345,63
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	329.628,16	357.467,71	388.095,54	418.604,03	439.844,01
d Kesehatan & Pendidikan	126.690,02	133.200,38	143.752,18	152.978,48	162.179,99
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	479.848,66	519.015,22	578.860,14	609.334,86	629.069,83
f Hotel & Restoran	91.085,75	98.845,76	109.751,17	113.990,72	120.221,58
g Lainnya	77.282,39	86.130,79	91.675,39	96.506,93	100.712,39
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100.434,83	109.029,57	133.151,63	133.057,87	148.024,78
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	741.147,16	904.132,35	1.008.399,75	1.187.424,04	1.207.137,04
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.516.260,29	2.478.430,63	2.667.054,69	2.801.497,36	3.034.739,48
a Bangunan	1.329.364,41	1.431.996,88	1.500.569,14	1.577.016,39	1.659.017,92
b Non-Bangunan	1.186.895,88	1.046.433,75	1.166.485,55	1.224.480,97	1.375.721,56
5 Perubahan Inventori	66.033,43	5.187,57	(45,26)	(22,97)	(13,70)
6 Ekspor	1.938.476,01	2.117.506,93	2.169.126,82	2.209.883,79	2.100.731,76
7 Dikurangi Impor	3.032.989,82	3.160.569,39	3.362.397,84	3.555.557,04	3.554.354,31
P D R B	4.743.927,54	5.053.124,33	5.468.952,96	5.835.041,96	6.219.219,19

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.274.951,29	2.345.102,97	2.432.480,08	2.530.703,72	2.615.563,90
a Makanan, Minuman & Rokok	1.109.980,65	1.150.008,80	1.192.582,01	1.238.184,12	1.276.487,36
b Pakaian & Alas Kaki	135.166,02	137.976,73	143.184,14	147.916,22	152.368,50
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	299.032,02	306.633,29	317.794,15	333.104,67	347.744,25
d Kesehatan & Pendidikan	115.061,93	117.063,76	121.009,77	124.685,33	128.431,99
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	459.388,41	471.496,58	490.696,71	513.605,50	531.354,98
f Hotel & Restoran	80.063,15	82.605,42	85.171,25	87.930,67	91.588,58
g Lainnya	76.259,12	79.318,40	82.042,05	85.277,22	87.588,23
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.989,18	106.812,40	123.484,69	118.109,72	127.393,15
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	651.518,53	667.613,10	702.943,30	753.442,28	754.460,65
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.319.723,33	2.259.993,03	2.351.195,43	2.441.363,27	2.540.806,05
a Bangunan	1.169.856,59	1.251.007,54	1.287.078,44	1.326.842,65	1.371.110,51
b Non-Bangunan	1.149.866,74	1.008.985,49	1.064.116,99	1.114.520,63	1.169.695,54
5 Perubahan Inventori	62.752,12	4.528,46	(35,69)	(17,91)	(9,61)
6 Ekspor	1.846.444,66	2.066.225,57	2.067.142,96	2.068.088,74	1.960.943
7 Dikurangi Impor	2.660.835,19	2.676.606,70	2.743.368,10	2.768.612,19	2.683.947
P D R B	4.594.543,92	4.773.668,84	4.933.842,67	5.143.077,64	5.315.210,52

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50,90	51,44	52,18	52,42	52,79
a Makanan, Minuman & Rokok	24,45	24,56	24,90	25,30	26,20
b Pakaian & Alas Kaki	3,17	3,24	3,28	3,28	3,24
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,95	7,07	7,10	7,17	7,07
d Kesehatan & Pendidikan	2,67	2,64	2,63	2,62	2,61
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10,12	10,27	10,58	10,44	10,11
f Hotel & Restoran	1,92	1,96	2,01	1,95	1,93
g Lainnya	1,63	1,70	1,68	1,65	1,62
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,12	2,16	2,43	2,28	2,38
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,62	17,89	18,44	20,35	19,41
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	53,04	49,05	48,77	48,01	48,80
a Bangunan	28,02	28,34	27,44	27,03	26,68
b Non-Bangunan	25,02	20,71	21,33	20,98	22,12
5 Perubahan Inventori	1,39	0,10	(0,00)	(0,00)	(0,00)
6 Ekspor	40,86	41,90	39,66	37,87	33,78
7 Dikurangi Impor	63,93	62,55	61,48	60,93	57,15
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	49,51	49,13	49,30	49,21	49,21
a Makanan, Minuman & Rokok	24,16	24,09	24,17	24,07	24,02
b Pakaian & Alas Kaki	2,94	2,89	2,90	2,88	2,87
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,51	6,42	6,44	6,48	6,54
d Kesehatan & Pendidikan	2,50	2,45	2,45	2,42	2,42
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10,00	9,88	9,95	9,99	10,00
f Hotel & Restoran	1,74	1,73	1,73	1,71	1,72
g Lainnya	1,66	1,66	1,66	1,66	1,65
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,18	2,24	2,50	2,30	2,40
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,18	13,99	14,25	14,65	14,19
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	50,49	47,34	47,65	47,47	47,80
a Bangunan	25,46	26,21	26,09	25,80	25,80
b Non-Bangunan	25,03	21,14	21,57	21,67	22,01
5 Perubahan Inventori	1,37	0,09	(0,00)	(0,00)	(0,00)
6 Ekspor	40,19	43,28	41,90	40,21	36,89
7 Dikurangi Impor	57,91	56,07	55,60	53,83	50,50
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,30	7,66	9,78	7,19	7,33
a Makanan, Minuman & Rokok	4,12	7,01	9,74	8,39	10,39
b Pakaian & Alas Kaki	3,91	8,96	9,73	6,47	5,31
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,18	8,45	8,57	7,86	5,07
d Kesehatan & Pendidikan	6,35	5,14	7,92	6,42	6,01
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4,28	8,16	11,53	5,26	3,24
f Hotel & Restoran	11,40	8,52	11,03	3,86	5,47
g Lainnya	8,01	11,45	6,44	5,27	4,36
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,91	8,56	22,12	(0,07)	11,25
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,89	21,99	11,53	17,75	1,66
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,55	(1,50)	7,61	5,04	8,33
a Bangunan	12,75	7,72	4,79	5,09	5,20
b Non-Bangunan	2,26	(11,83)	11,47	4,97	12,35
5 Perubahan Inventori	186,90	(92,14)	(100,87)	(49,24)	(40,36)
6 Ekspor	7,60	9,24	2,44	1,88	(4,94)
7 Dikurangi Impor	17,64	4,21	6,39	5,74	(0,03)
P D R B	1,52	6,52	8,23	6,69	6,58

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (persen)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,11	3,08	3,73	4,04	3,35
a Makanan, Minuman & Rokok	2,65	3,61	3,70	3,82	3,09
b Pakaian & Alas Kaki	2,44	2,08	3,77	3,30	3,01
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,99	2,54	3,64	4,82	4,39
d Kesehatan & Pendidikan	3,26	1,74	3,37	3,04	3,00
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,31	2,64	4,07	4,67	3,46
f Hotel & Restoran	3,92	3,18	3,11	3,24	4,16
g Lainnya	9,69	4,01	3,43	3,94	2,71
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,75	6,82	15,61	(4,35)	7,86
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,46	2,47	5,29	7,18	0,14
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,60	(2,57)	4,04	3,83	4,07
a Bangunan	2,99	6,94	2,88	3,09	3,34
b Non-Bangunan	2,21	(12,25)	5,46	4,74	4,95
5 Perubahan Inventori	33,23	(92,78)	(100,79)	(49,83)	(46,35)
6 Ekspor	5,88	11,90	0,04	0,05	(5,18)
7 Dikurangi Impor	10,01	0,59	2,49	0,92	(3,06)
P D R B	0,56	3,90	3,36	4,24	3,35

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	112,39	121,00	132,83	142,38	152,82
a Makanan, Minuman & Rokok	109,88	117,58	129,03	139,85	154,38
b Pakaian & Alas Kaki	115,96	126,35	138,64	147,60	155,44
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	116,52	126,37	137,19	147,98	155,49
d Kesehatan & Pendidikan	116,24	122,22	131,90	140,36	148,81
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	111,68	120,80	134,73	141,82	146,41
f Hotel & Restoran	121,32	131,66	146,19	151,83	160,13
g Lainnya	116,05	129,33	137,66	144,91	151,23
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	113,07	122,75	149,91	149,80	166,65
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	118,53	144,60	161,28	189,91	193,06
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	120,18	118,38	127,39	133,81	144,95
a Bangunan	119,71	128,95	135,13	142,01	149,40
b Non-Bangunan	120,72	106,43	118,64	124,54	139,92
5 Perubahan Inventori	77,25	6,07	(0,05)	(0,03)	(0,02)
6 Ekspor	119,14	130,14	133,32	135,82	129,11
7 Dikurangi Impor	137,45	143,24	152,38	161,14	161,08
P D R B	106,32	113,25	122,57	130,77	139,38

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	105,90	109,16	113,23	117,80	121,75
a	Makanan, Minuman & Rokok	105,16	108,95	112,98	117,30	120,93
b	Pakaian & Alas Kaki	104,35	106,52	110,54	114,19	117,63
c	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	105,71	108,40	112,34	117,75	122,93
d	Kesehatan & Pendidikan	105,57	107,41	111,03	114,40	117,84
e	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	106,92	109,74	114,21	119,54	123,67
f	Hotel & Restoran	106,64	110,03	113,45	117,12	121,99
g	Lainnya	114,51	119,10	123,19	128,05	131,52
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,57	120,25	139,02	132,97	143,42
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	104,20	106,77	112,42	120,50	120,66
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	110,80	107,94	112,30	116,61	121,36
a	Bangunan	105,35	112,66	115,90	119,48	123,47
b	Non-Bangunan	116,95	102,62	108,23	113,36	118,97
5	Perubahan Inventori	73,41	5,30	(0,04)	(0,02)	(0,01)
6	Ekspor	113,48	126,99	127,05	127,11	120,52
7	Dikurangi Impor	120,59	121,30	124,33	125,47	121,64
P D R B		102,97	106,98	110,57	115,26	119,12

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran
(2010=100)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	106,14	110,84	117,31	120,87	125,52
a Makanan, Minuman & Rokok	104,49	107,92	114,20	119,22	127,66
b Pakaian & Alas Kaki	111,13	118,61	125,42	129,26	132,14
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,23	116,58	122,12	125,67	126,48
d Kesehatan & Pendidikan	110,11	113,78	118,79	122,69	126,28
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	104,45	110,08	117,97	118,64	118,39
f Hotel & Restoran	113,77	119,66	128,86	129,64	131,26
g Lainnya	101,34	108,59	111,74	113,17	114,98
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,45	102,08	107,83	112,66	116,20
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	113,76	135,43	143,45	157,60	160,00
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	108,47	109,67	113,43	114,75	119,44
a Bangunan	113,63	114,47	116,59	118,85	121,00
b Non-Bangunan	103,22	103,71	109,62	109,87	117,61
5 Perubahan Inventori	105,23	114,55	126,82	128,30	142,62
6 Ekspor	104,98	102,48	104,93	106,86	107,13
7 Dikurangi Impor	113,99	118,08	122,56	128,42	132,43
P D R B	103,25	105,85	110,85	113,45	117,01

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran (2010=100)

Komponen	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,12	4,43	5,84	3,03	3,85
a Makanan, Minuman & Rokok	1,43	3,28	5,82	4,39	7,08
b Pakaian & Alas Kaki	1,44	6,74	5,74	3,06	2,23
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,01	5,76	4,76	2,90	0,65
d Kesehatan & Pendidikan	2,99	3,34	4,40	3,28	2,92
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	0,94	5,38	7,17	0,57	(0,21)
f Hotel & Restoran	7,20	5,18	7,69	0,60	1,25
g Lainnya	(1,53)	7,15	2,90	1,28	1,60
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,15	1,62	5,64	4,48	3,14
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,35	19,05	5,93	9,86	1,52
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,82	1,10	3,44	1,16	4,09
a Bangunan	9,48	0,73	1,85	1,94	1,80
b Non-Bangunan	0,05	0,48	5,70	0,22	7,05
5 Perubahan Inventori	115,33	8,86	10,71	1,16	11,16
6 Ekspor	1,62	(2,38)	2,39	1,83	0,25
7 Dikurangi Impor	6,93	3,59	3,80	4,78	3,12
P D R B	0,95	2,52	4,72	2,35	3,13

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Jl. Sisingamangaraja No. 2, Meulaboh
Telp (0655) 755330 E-mail : bps1107@bps.go.id
Homepage : <http://acehbaratkab.bps.go.id>

ISSN 2541-4909



9 772541 490008